

**ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA SUNGAI RAMBAI KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si)**



Oleh

**NAMA : RUDI SAPUTRA
NOMOR MAHASISWA : 187121020
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

**ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA SUNGAI RAMBAI KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

TESIS

Oleh:

RUDI SAPUTRA
NPM : 187121020

Ketua

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., MSi

Dr. Surizki Febrianto, SH.MH

Anggota

Dr. H. A. Tarmizi Yussa., M.A

Megetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH., M.Hum

**ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA SUNGAI RAMBAI KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

TESIS

NAMA : RUDI SAPUTRA
NPM : 187121020
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I
Pekanbaru, 17/03/2022

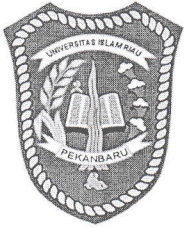

Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, 20/01/2022


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Megetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Pascasarjana Universitas Islam Riau


Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 075/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **RUDI SAPUTRA**
NPM : **187121020**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah ,(tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 18 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Administrasi

Dr. H. Moris Adidi-Yogia, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 18 Maret 2022
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 18-Mar-2022 11:25 WIB
ID: 1786878565
Word Count: 31273
Submitted: 1

Similarity Index

28%

Similarity by Source

Internet Sources:	28%
Publications:	7%
Student Papers:	17%

ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL
DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA SUNGAI RAMBAI KECAMATAN
KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR By Rudi
Saputra

4% match (Internet from 21-Jun-2021)
<http://repository.uir.ac.id/1856/1/187121009.pdf>

2% match (Internet from 27-Nov-2020)
http://repository.uin-suska.ac.id/18708/7/7.%20BAB%20II_2018580IH.pdf

2% match (Internet from 17-Dec-2018)
<http://eprints.umm.ac.id/41643/3/BAB%20II.pdf>

2% match (Internet from 10-Mar-2022)
<https://adoc.pub/kinerja-pendamping-lokal-desa-dalam-peningkatan-pembangunan-.html>

1% match (Internet from 30-Jan-2022)
<http://repository.uir.ac.id/3692/5/bab2.pdf>

1% match (Internet from 13-Jun-2019)
<http://repository.uir.ac.id/462/2/bab2.pdf>

1% match ()
Neneng Yulia Susanti. "PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAPPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNANDI DESA SUNGAI PAKU KECAMATAN KAMPAR KIRIKABUPATEN KAMPAR", 2012

1% match (Internet from 29-May-2018)
<http://repository.uin-suska.ac.id/4761/3/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 26-Nov-2020)
http://repository.uin-suska.ac.id/14484/7/7.%20BAB%20II_2018726ADN.pdf

1% match (Internet from 06-Sep-2021)
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15956-Full_Text.pdf

1% match (Internet from 11-Jan-2022)
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19373-Full_Text.pdf

1% match (Internet from 18-Dec-2021)
<http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/458/1/B8.pdf>

1% match (Internet from 09-Jul-2018)
<http://www.forumdesa.com/2018/02/etika-profesi-pendamping-masyarakat.html>

1% match (student papers from 12-Feb-2019)
Submitted to Universitas Merdeka Malang on 2019-02-12

1% match (Internet from 09-Feb-2022)
<https://www.slideshare.net/ahmadefendi19/permendes-no-3-tahun-2015>

1% match (Internet from 18-Dec-2018)
<http://digilib.unila.ac.id/16288/13/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 28-Jul-2013)
<http://duniakampusblog.files.wordpress.com/2012/05/peranan-pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa.doc>

1% match (Internet from 12-Nov-2021)
http://repo.apmd.ac.id/1623/1/LIDIA%20ASTUTI%20ANGGO_17520130.pdf

1% match (Internet from 12-Sep-2018)
<https://www.scribd.com/document/384327455/6-Kepemimpinan-pdf>

1% match (Internet from 12-Sep-2017)
<http://etheses.uin-malang.ac.id/3443/1/12210066.pdf>

1% match (Internet from 19-Jan-2021)
https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/Permendesa_PDTT_19_tahun_2020.pdf

1% match (Internet from 17-Aug-2018)
http://digilib.uinsby.ac.id/27237/1/Siti%20Romzah_E04213103.pdf

1% match ()

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi peserta ujian komprehensif Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Saputra
NPM : 187121020
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Penelitian : Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah dan keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Maret 2022

buat Pernyataan




Rudi Saputra

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 290/KPTS/PPs-UIR/2022

TENTANG

**PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Rudi Saputra** tanggal 19 Maret 2022 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 10 Maret 2021
 10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 605/KPTS/PPs-UIR/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RUDI SAPUTRA**
N P M : **187121020**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**
Judul Tesis Baru : **"ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUNGAI RAMBAI KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR"**.

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 22 Maret 2022

Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul **“Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”** ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Strata Dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH., M. Hum yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pascasarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si. yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.

4. Bapak Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi, dan adik-adik tingkat yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2022
Penulis

Rudi Saputra

**ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA SUNGAI RAMBAI KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN
KAMPAR**

**Oleh : Rudi Saputra
NPM : 187121020**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Variabel penelitian ini adalah Kinerja Pendamping Lokal Desa yang terdiri dari empat indikator kinerja yaitu: Prestasi kerja (Achievement), Keahlian (Skill), Perilaku (Attitude) dan Kepemimpinan (Leadership). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah Pendamping Desa yang bertugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, aparatur Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat beserta masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berada pada kategori Baik. Faktor yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat antara lain adalah: minimnya jumlah tenaga Pendamping yang bertugas di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, adanya penugasan-penugasan diluar tugas rutin pendamping lokal desa yang diberikan kepada pendamping lokal desa tanpa dibekali dengan kegiatan pelatihan serta terjadi perubahan-perubahan nomenklatur administrasi pelaporan kegiatan. Berbagai permasalahan ini secara langsung akan mempengaruhi kinerja Fasilitator Lokal Desa dalam melaksanakan tugas pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah agar senantiasa memperhatikan jumlah kebutuhan tenaga Pendamping Lokal Desa yang akan ditempatkan serta untuk setiap penugasan yang diberikan hendaknya terlebih dahulu disertai dengan pembekalan pendidikan dan pelatihan yang memadai, agar dalam tahap pelaksanaan kegiatan di desa dapat dipahami dengan baik oleh Pendamping Lokal Desa.

Kata Kunci : Kinerja Pendamping Lokal Desa

**PERFORMANCE ANALYSIS OF VILLAGE LOCAL ASSISTANT
IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN
SUNGAI RAMBAI VILLAGE, KAMPAR KIRI DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

vii

By : Ruai Saputra

NPM : 187121020

Abstract

This study aims to determine the performance of local village assistants in community empowerment in Sungai Rambai Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency and the factors that affect the Performance of Local Village Facilitators in Community Empowerment in Sungai Rambai Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. The variable of this research is the Performance of Local Village Facilitators which consists of four performance indicators, namely: Achievement, Skills, Attitude and Leadership. The research method used is a quantitative research method. The population and sample in this study were Village Assistants who were tasked with carrying out village community empowerment activities in Sungai Rambai Village, Kampar Kiri Subdistrict, Kampar Regency, Government officials of Sungai Rambai Village, Community Leaders and the people of Sungai Rambai Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. From the results of the study, it is known that the Performance of Local Village Facilitators in community empowerment in Sungai Rambai Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency is in the Good category. Factors that affect the performance of Village Local Facilitators in implementing community empowerment programs include: the minimum number of Village Local Facilitators on duty in Kampar Kiri District, Kampar Regency, the existence of assignments outside the routine duties of village local assistants given to local village assistants without being provided with training activities as well as changes to the administrative nomenclature of activity reporting. These various problems will directly affect the performance of the Local Village Facilitator in carrying out the task of mentoring and empowering village communities. For this reason, it is hoped that the Government will always pay attention to the number of needs for local village assistants who will be placed and for each assignment given, it should first be accompanied by adequate education and training, so that in the stage of implementing activities in the village it can be well understood by the local village assistants. .

Keywords: *Performance of Local Village Facilitators*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
2.1. Tinjauan Pustaka	15
2.1.1. Konsep Administrasi Publik.....	15
2.1.2. Konsep Administrasi Pembangunan	17
2.1.3. Konsep Kebijakan Publik.....	21
2.1.4. Konsep Manajemen Publik	23
2.1.5. Konsep Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	24
2.1.6. Konsep Pembangunan Desa	27
2.1.7. Konsep Kinerja.....	29
2.1.8. Konsep Pendamping Desa.....	35
2.1.9. Konsep Pemberdayaan	42
2.1.10. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	44
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu	50
2.3. Kerangka Pemikiran.....	54
2.4. Konsep Operasional	55
2.5. Operasional Variabel.....	57
2.6. Teknik Pengukuran	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1. Tipe Penelitian.....	61
3.2. Lokasi Penelitian.....	61
3.3. Populasi dan Sampel	62
3.4. Teknik Penarikan Sampel.....	63
3.5. Jenis dan Sumber Data	64

3.6. Teknik Pengumpulan Data	65
3.7. Teknik Analisa Data	66
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	69
4.1. Sejarah Ringkas	69
4.1.1. Sejarah Desa Sungai Rambai	69
4.2. Demografi Desa Sungai Rambai	71
4.3. Keadaan Sosial Budaya Desa Sungai Rambai	72
4.3.1. Keadaan Ekonomi Desa Sungai Rambai	78
4.3.2. Kondisi Pemerintahan Desa Sungai Rambai	81
4.4. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Sungai Rambai	82
BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	88
5.1. Gambaran Subjek Penelitian	88
5.2. Analisa Data Hasil Penelitian	91
5.2.1. Prestasi kerja (<i>Achievement</i>)	95
5.2.2. Keahlian (<i>skill</i>)	107
5.2.3. Perilaku (<i>Attitude</i>)	113
5.2.4. Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	117
5.3. Pembahasan	123
5.3.1. Analisis Indikator Prestasi kerja (<i>Achievement</i>)	123
5.3.2. Analisis Indikator Keahlian (<i>skill</i>)	123
5.3.3. Analisis Indikator Perilaku (<i>Attitude</i>)	124
5.3.4. Analisis Indikator Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	125
5.3.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	126
BAB VI PENUTUP	128
6.1. Kesimpulan	128
6.2. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Profil <i>Eksisting</i> Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan Lokasi Pengentasan 2020-2024 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020.....	9
1.2. Data Pendamping Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Sebagai <i>Best Practice</i> Pendampingan Desa.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	50
2.2 Operasionalisasi Variabel.....	57
2.3 Tabel Skala Likert	60
3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	63
4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sungai Rambai Tahun 2021.....	72
4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Sungai Rambai Tahun 2021.....	73
4.3. Keadaan Kesehatan Desa Sungai Rambai Tahun 2021	75
4.4 Keadaan Infrastruktur Pendidikan Desa Sungai Rambai Tahun 2021	76
4.5. Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Sungai Rambai Tahun 2021	76
4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Sungai Rambai Tahun 2021	78
4.7. Jumlah Tempat Ibadah Desa Sungai Rambai.....	78
4.8. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Desa Sungai Rambai Tahun 2021	80
5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	89
5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	89
5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	90

5.4.	Penilaian <i>Interprestasi</i> Mean Variabel Penelitian.....	95
5.5.	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Prestasi kerja (<i>Achievement</i>)	97
5.6.	Data Kegiatan Pemberdayaan Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai Tahun 2020.....	104
5.7.	Nama Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2021	105
5.8.	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Keahlian (<i>Skill</i>)	110
5.9.	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Perilaku (<i>Attitude</i>)	115
5.10.	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	115
5.11.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Desa di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampa.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Struktur Organisasi Pendamping Desa	42
2.2. Kerangka Pikir Penelitian Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam PEMBERDAYAAN Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar	54
4.1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	82



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Quisioner Penelitian Kepada Pendamping Desa Kecamatan Kampar Kiri.....	137
2. Quisioner Penelitian Kepada Aparatur Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat (KK) Desa Sungai Rambai	141
3. Wawancara Penelitian.....	145
4. Wawancara Penelitian	147
5. Data Teli Hasil Penelitian.....	149
6. Surat Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Lokal Desa Nomor 21/14/PLD/PPPMD/PPK-III/II/2021	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembentukan negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara atau masyarakat, bukan individu tertentu, (Efriza:2013:62). Artinya, kesejahteraan warga negara atau masyarakat menjadi hak warga negara dan tanggungjawab negara dengan pemerintahannya.

Sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ... “

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan tersebut dikelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Pembangunan adalah suatu bentuk perubahan sosial yang diarahkan dan direncanakan melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program berupa Nawacita Presiden, dimana salah satunya pada poin tiga menyatakan bahwa Presiden ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara. Kesatuan

Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di era pemerintahan saat ini, pelaksanaan pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi), tetapi harus tersebar di seluruh Indonesia (desentralisasi).

Oleh sebab itu maka, sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi adalah konsep – konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk dalam organisasi negara, (Hanif:2007:3).

Kemudian dari pada itu pembangunan merupakan kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-non fisik dan material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan masyarakat, (Sufian:2005:1).

Sementara itu, di era otonomi daerah saat ini, pembangunan daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah, khususnya di pedesaan. Namun, pembangunan daerah

pedesaan ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kerja keras para pemangku kepentingan.

Mengembangkan daerah pedesaan tidak hanya terkait dengan wilayah atau wilayah geografis yang berbatasan dengan perbatasan negara tetangga, tetapi juga tentang masyarakat yang terpinggirkan dan kurang mampu secara ekonomi. Pinggiran juga menunjukkan kondisi minimnya pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini akibat pembangunan yang selama ini hanya terfokus pada kawasan perkotaan yang dianggap sebagai pusat pertumbuhan.

Untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah khususnya di pedesaan maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka menjadi awal baru dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintahan desa dapat memabangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, tetapi ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Tujuan dari semua itu tidak lain untuk memudahkan desa mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.

Maka dari itu, dengan diberlakukannya Undang-undang desa, secara langsung memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat maupun adat istiadat desa. Dalam kerangka kewenangan tersebut maka desa dapat dibuat peraturan desa yang mengatur hal-hal teknis pelaksanaan pemerintah pemerintah desa. Keberadaan Undang-undang desa juga memberikan amanan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah dalam jumlah yang besa. Kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, transparan, efekti dan efisien serta akuntabel.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016, diamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa akan dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Nomor tentang Desa. Dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengamanatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Kemen Desa PDTT). Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, Kemen Desa PDTT akan melakukan kegiatan pendampingan melalui penyediaan tenaga pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan di bidang pembangunan desa. Tenaga ahli ini nantinya akan ditempatkan di kecamatan, kelurahan, dan desa.

Bantuan Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Desa, pada Pasal 1 ayat 14 dijelaskan bahwa:

“Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.”

Secara konseptual Gitosaputro (2015:75) memberikan definisi “Pendampingan” sebagai kegiatan membantu masyarakat untuk belajar, menyelesaikan masalah, mengorganisasikan diri dalam melakukan kegiatan aksinya.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pendampingan secara berjenjang. Pendampingan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang secara berjenjang. Pendampingan tersebut merupakan tanggung jawab daerah Kabupaten/Kota, namun dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau pihak ketiga.

Sementara itu, tugas Pendamping Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa pada pasal 11 dan 12 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 11

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya

- alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
 - f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi Pendamping Masyarakat Desa, maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Masyarakat Desa, dimana pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa: "Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa".

Adapun tujuan dilaksanakannya Pendampingan Masyarakat Desa tersebut, maka dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Masyarakat Desa, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 antara lain sebagai berikut:

Pendampingan Masyarakat Desa bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif;
- c. Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya Desa bagi kesejahteraan dan keadilan; dan
- d. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan Peraturan tersebut dapat diartikan bahwa pada prinsipnya pendampingan kepada desa merupakan upaya menggerakkan potensi yang ada di desa agar desa mampu memanfaatkan potensinya dan desa dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, pendampingan desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai kegiatan membantu desa dalam menjalankan aspek teknokratis dan administratif..

Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana tertuang dalam Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa pasal 17 sd 1 menyatakan bahwa: Tenaga Pendamping Profesional terdiri dari: Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. di dalam pasal 18 sampai pasal 21 diuraikan bahwa :

1. Pendamping Lokal Desa (PLD) berkedudukan ditingkat Desa
2. Pendamping Desa Berkedudukan di Kecamatan
3. Pendamping Teknis berkedudukan di Kecamatan
4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat

Upaya pemberdayaan oleh Fasilitator Lokal Desa harus dilakukan secara maksimal, karena Fasilitator Lokal Desa merupakan aktor dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di desa..

Salah satu tugas utama Pendamping Lokal Desa adalah melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Soemantri,2010:74). Pemberdayaan adalah sebagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber

daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial (Rahayu, 2008).

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Masyarakat Desa, pada Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Agar program pemberdayaan masyarakat”

Agar program pemberdayaan masyarakat desa tersebut dapat terselenggara dengan baik, maka peran aktif dari seluruh Pendamping Desa dalam melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat sangat diharapkan. Upaya pemberdayaan oleh Fasilitator Lokal Desa harus dilakukan secara maksimal, karena Fasilitator Lokal Desa merupakan aktor dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di desa. Untuk itu segenap Pendamping Desa dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar program pemberdayaan masyarakat desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Salah satu Desa di wilayah Kabupaten Kampar tepatnya di Kecamatan Kampar Kiri yang melaksanakan program pendampingan desa adalah Desa Sungai. Hal ini disebabkan karena Desa Sungai Rambai hingga saat ini berdasarkan data Eksisting 2019 Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1. Profil Eksisting Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan Lokasi Pengentasan 2020-2024 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020

No	Kode Desa	Nama Desa	IDM	Status IDM
1	1401072004	Padang Sawah	0,5836	Tertinggal
2	1401072006	IV Koto Setingkai	0,5951	Tertinggal
3	1401072008	Teluk Paman	0,5824	Tertinggal
4	1401072016	Sungai Paku	0,5971	Tertinggal
5	1401072019	Muara Selayah	0,5538	Tertinggal
6	1401072020	Sungai Rambai	0,5208	Tertinggal
7	1401072021	Tanjung Harapan	0,5646	Tertinggal
8	1401072023	Sungai Raja	0,5936	Tertinggal
9	1401072026	Sungai Sarik	0,5584	Tertinggal
10	1401072031	Tanjung Mas	0,5005	Tertinggal
11	1401072032	Sungai Harapan	0,5211	Tertinggal
12	1401072034	Teluk Paman Timur	0,5640	Tertinggal

(Sumber : idm.kemendes.go.id) Tahun 2020

Berdasarkan data Profil Eksisting Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan Lokasi Pengentasan 2020-2024 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2020 pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Desa Sungai Rambai masih berstatus Desa Tertinggal dengan nilai IDM 0,5208.

Untuk itu, maka peran penting Pendamping Desa sangat diperlukan agar peningkatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Sungai Rambai dapat berjalan dengan baik sehingga Desa Sungai Rambai terlepas dari status Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, Desa Maju bahkan diharapkan dapat meningkat menjadi Desa Mandiri.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pendampingan Desa dalam hal ini diperlukan agar masyarakat desa sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga desa. Fasilitator Desa harus berperan sebagai *community organizer* yang harus jeli membaca fenomena hubungan lembaga dengan masyarakat desa. Pada akhirnya apakah keberadaan pendamping desa ini dapat menjadi solusi untuk optimalisasi

pembangunan desa, sehingga kita dapat melihat apa saja manfaat dari pendampingan desa, mekanisme kerja, dan tantangan apa yang akan dihadapi oleh para pendamping desa ke depan.

Begitu juga dengan jumlah tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di masing-masing Desa sesuai dengan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa pasal 17 di mana satu orang Pendamping Lokal Desa (PLD) berkedudukan ditingkat Desa ini artinya secara idealnya satu orang Pendamping Desa bertugas mendampingi 1 desa binaan.

Seperti halnya kegiatan Pendampingan yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil penelitian Nina Yuslimi (2019:8) dengan judul penelitian “Evaluasi Program Pendampingan Desa di Kabupaten Bengkalis” dimana dalam penelitian tersebut diketahui bahwa untuk jenis kegiatan pendampingan desa di Kabupaten Bengkalis Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sudah melaksanakan kegiatan pendampingan desa dengan baik dimana untuk 1 Desa di dampingi oleh 3 Pendamping Desa dengan klasifikasi Pendamping seperti yang dijelaskan pada tabel 1,2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel.1.2. Data Pendamping Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Data Pendamping Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Sebagai *Best Practice* Pendampingan Desa

No	Klasifikasi Pendamping Desa	Jumlah Orang
1	Pendamping Desa Ekonomi	170
2	Pendamping Desa Pembangunan	88
3	Tenaga Akuntansi Desa	7
Jumlah		265

Sumber: DPMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Penjelasan tentang Pendampingan Desa diatas dapat dijadikan sebagai *Best Practice* pemberdayaan masyarakat Desa dan hendaknya dapat di jadikan acuan bagi Desa-Desa lainnya baik yang ada di Provinsi Riau ataupun di Indonesia pada umumnya.

Begitu besarnya peran Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh secara langsung pada keberhasilan melaksanakan pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Namun berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terkait dengan kinerja Pendampng Lokal Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa masih ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas kinerja Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai yang kurang memahami pengetahuan tentang desa, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat Desa Sungai Rambai. Hal itu terbukti dengan kurangnya kedekatan antara pendamping lokal Desa Sungai Rambai dengan aparatur desa dan juga seluruh masyarakat. Begitu juga dengan hasil kerja yang tidak nampak oleh aparat Desa Sungai Rambai maupun masyarakat setempat, jadi masyarakat belum mengetahui denganbaik fungsi Pendamping Lokal Desa di desa mereka.
2. Kuantitas kerja Fasilitator Desa Lokal di Desa Sungai Rambai masih belum optimal, hal ini disebabkan kurangnya pendamping desa dan pendampingan kegiatan di Desa Sungai Rambai dan fokus kinerja mereka terbagi karena banyaknya tanggung jawab di desa lain yang mereka bantu. Hal ini

dibuktikan dengan adanya 1 orang pendamping yang mendampingi 3 sampai dengan 4 desa sekaligus, serta kondisi pendamping di tingkat kecamatan yang terkadang dimutasi ke kecamatan lain, sehingga menyulitkan para Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pendampingan. Desa Sungai Rambai..

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Pendamping Lokal Desa di Desa Sungai Rambai masih belum maksimal, serta pendamping yang hanya memberikan arahan tentang peraturan dan pelaksanaan di lapangan juga jarang mendampingi di Desa Sungai Rambai, pendamping Desa turun ke desa terkadang hanya untuk meminta tanda tangan laporan.
4. Fasilitas pendampingan desa selama ini hanya berupa gaji dan ada juga desa yang menyediakan transportasi saat berkunjung ke desanya. Sedangkan untuk sekretariat pendampingan tidak ada bantuan karena minimnya tenaga pendamping desa dan sarana prasarana desa yang belum memadai seperti perangkat elektronik (laptop) yang tidak mendukung kinerja..
5. Upaya pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Rambai belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena pendamping belum menguasai tugas pokok dan fungsinya dan juga kurangnya koordinasi dengan pendamping Desa di tingkat kecamatan, karena pendamping Desa hanya sibuk menyusun laporannya. Program yang harus dilakukan oleh seorang pendamping desa antara lain koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenai pembangunan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa sesuai prinsip *good governance*. Namun kenyataannya semua itu belum

terwujud, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Rambai.

6. Sistem Pengawasan dan Pengendalian di Desa Sungai Rambai dilakukan oleh pemerintah desa setempat dan di lapangan. Pendamping Desa setempat didampingi oleh PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur), tetapi pendamping tidak mendampingi dalam pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat di Desa Sungai Rambai masih kurang pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut dalam penulisan tesis yang berjudul *“Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”*

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja Pendamping Lokal Desa dalam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar serta faktor yang mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendamping desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendamping desa

dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar .

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari penggunaan teoritis berdasarkan kontekstual dan konseptual dan penggunaan praktis sebagai masukan bagi institusi yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: :

- a) Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang akan melaksanakan penelitian lanjutan sehubungan dengan kinerja pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Secara teoritis penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khusus tentang ilmu administrasi dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau
- c) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan berpikir dalam mengetahui bagaimana peran yang dimainkan oleh pendamping desa dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan analisis dan wacana ke depan mengenai Fasilitator Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Menurut Kerlinger dalam (Pasolong:2011:9) teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut (Pasolong:2011:10) teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu (*ad*) dan (*ministrare*) yang berarti (*to serve*) yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi, (Pasolong:2011:2-3). Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki, menurut Syafi'ie dalam (Pasolong:2011:6).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang dikemukakan oleh (Dewi:2011:3) sebagai berikut:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan :

menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.

2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Menurut Utomo dalam (Tahir:2011:33), Perkembangan Ilmu Administrasi Negara akhir-akhir ini mengalami pergeseran tekanan dari Administrasi Negara menjadi Administrasi oleh Publik dimana dalam Administrasi Negara merupakan agen tunggal untuk melaksanakan fungsi negara/pemerintahan. Konsep ini menekankan pada fungsi negara/pemerintah sebagai pelayanan publik (Administrasi Publik). Sedangkan *Administration by Public* berorientasi pada tuntutan publik yang berbeda-beda, dalam artian fungsi negara/pemerintah hanya sebagai fasilitator, katalisator yang menitikberatkan pada menempatkan pelanggan pada driver set. Dimana penetapan negara/pemerintah tidak lagi menjadi faktor atau aktor utama sebagai penggeraknya.

Dampak pergeseran tersebut menurut (Tahir: 2011: 34), telah mengakibatkan perubahan makna publik sebagai negara, menjadi publik sebagai masyarakat. Dengan demikian pendekatan penyelenggaraan negara tidak lagi berorientasi pada negara melainkan kepada masyarakat atau *Customer Oriented* atau *Customer's Approach*. Dan ini merupakan tuntutan perubahan dari pemerintah yang lebih menitikberatkan kewenangan kepada pemerintahan yang menitikberatkan pada keserasian antar aktor yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Dikalangan masyarakat istilah *Public Administration* selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Administrasi Negara.

Dengan demikian, sebenarnya telah terjadi perubahan makna *public as a state*, menjadi *public as a society*. Dalam artian penyelenggaraan negara tidak lagi terlalu berorientasi pada kegiatan oleh negara, tetapi menjadi oleh, untuk dan bagi masyarakat. Pendekatan penyelenggaraan negara tidak lagi kepada negara tetapi penekanannya pada masyarakat.

2.1.2. Konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2009:4). Liang Gie dalam (Pasalong: 2011: 3) mendefinisikan administrasi sebagai rangkaian kegiatan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Pasalong (2011:3) administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien dan rasional. Lebih lanjut dikatakannya bahwa administrasi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ciri dan dimensi unsur. Dimensi ciri-ciri yang melekat pada administrasi adalah efisien, efektif dan rasional, sedangkan dimensi unsur administrasi adalah:

- a. Ada tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama yang baik sekelompok orang atau instansi pemerintah dan lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh suatu kelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Siagian (2009:4), pembangunan diartikan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan sadar yang diambil oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembangunan bangsa. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa paling tidak ada tujuh gagasan pokok yang muncul dari definisi pembangunan yaitu upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, rencana pembangunan mengandung pengertian pertumbuhan dan perubahan, pembangunan menuju modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang menurut definisi bersifat multi dimensional, semua hal tersebut ditujukan untuk upaya pembangunan nasional.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat menyentuh langsung masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang diarahkan “bagaimana” untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Seperangkat pedoman untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan strategi pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan (Suharto, 2006:4)

Lebih lanjut, Todaro (dalam Suharto, 2006:3) berpendapat bahwa setidaknya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang saling terkait, yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas pemerataan kebutuhan pokok seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.

- b. Tercapainya kualitas hidup yang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan materil, tetapi juga mewujudkan rasa percaya diri dan kemandirian bangsa. Aspek-aspek tersebut meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat ditempuh ke arah yang positif dan lebih maju dari sebelumnya. Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan upaya sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu yang harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya sadar yang terkait dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal sebagai administrasi pembangunan.

Siagian (2009:5) mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan guna mencapai tujuan akhirnya.

Mostopadidjaya dalam Affifudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana mengembangkan sistem pemerintahan yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian administrasi pembangunan di atas, dapat dipahami bahwa sangat penting bagi kemajuan suatu negara melalui upaya pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Affifudin (2010:64) fokus pada analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara atau bangsa tertentu, termasuk metode ilmiah yang digunakan dalam memecahkan masalah, menghadapi tantangan, mengambil keputusan, memanfaatkan peluang dan menghilangkan ancaman. . Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan disiplin ilmu lainnya, yaitu:

- a. Orientasi penyelenggaraan pembangunan lebih diarahkan pada upaya perubahan kondisi yang dianggap lebih baik
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan pembenahan administrasi yang berkaitan dengan aspek pembangunan di bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Jika administrasi pembangunan termasuk dalam konteks pemikiran menurut Siagian, maka dapat dipahami bahwa administrasi pembangunan adalah upaya yang dilakukan desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan mengubah secara sadar dan terencana dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan. untuk mencapai tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa di Jayadinata (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana serta bidang pemerintahan.

Administrator adalah orang yang menempati posisi teratas dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang

menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar bagi kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini, posisi dan posisi teratas yang dimaksud adalah kepala desa

Kepala desa sebagai pelaksana pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki kondisi desa dengan berbagai program yang konstruktif. Menurut Kartono (2006:325), pelaksana pembangunan bertugas melaksanakan serangkaian upaya bersama dengan rakyat atau masyarakat dalam iklim demokrasi untuk melakukan perbaikan dan perbaikan cara hidup dan sarana kehidupan, demi tercapainya tujuan. kemakmuran, kebaikan dan keadilan yang merata.

Administrator pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Suharto (2006:7) kebijakan adalah ketentuan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan dapat berupa program-program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan berbagai program disiapkan untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Fungsi kebijakan di sini adalah memberikan perumusan berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program pelayanan yang efektif.

2.1.3. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Irfan Islamy (2003:20), kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ditekankan bahwa kebijakan publik dibuat secara

ketat atas nama kepentingan publik untuk memecahkan masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik berupa peraturan daerah berupa penetapan tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, memiliki dan didasarkan pada tujuan dan sasaran tertentu
4. Bahwa kebijakan publik harus selalu ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian kebijakan publik menurut James Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah *“a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* suatu langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor mengenai adanya masalah atau masalah tertentu yang dihadapi (Riant Nugroho, 2014:125). Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dengan keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Pendapat lain diungkapkan oleh Thomas R Dye, mendefinisikannya sebagai *“is whatever government choose to do or not to do ”* (apapun yang dipilih pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah tentang realisasi tindakan dan bukan sekedar pernyataan kehendak pemerintah atau pejabat publik. Selain itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (Riant Nugroho 2014:126).

Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara/pemerintah/lembaga sebagai strategi untuk mengatasi suatu masalah yang diwujudkan untuk suatu tujuan secara terstruktur dan dibuat berdasarkan undang-undang.

2.1.4. Konsep Manajemen Publik

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Overman dalam Keban (2008:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific manajement*”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “*scientific manajemen*”. Manajemen publik bukanlah “*policy analysis*”,

bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing dan controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

2.1.5. Konsep Kepemimpinan (*Leadership*)

Kepemimpinan (*leadership*) secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata memimpin mengandung arti mengarahkan, membina atau mengatur, membimbing dan juga menunjukkan atau mempengaruhi. Pemimpin memiliki tanggung jawab baik lahir maupun batin atas keberhasilan kegiatan kerja yang dipimpinnya, sehingga menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang akan memiliki kesamaan dalam menjalankan kepemimpinannya.

Menurut Wahjosumidjo (2005: 17) kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola, interaksi, hubungan kerjasama antar peran, posisi satu posisi administratif, dan persuasi, dan persepsi orang lain. tentang legitimasi pengaruh. Miftah Thoha (2010: 9) kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Menurut C. Turney (1992) dalam Martinis Yamin dan Maisah (2010: 74) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses kelompok yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasi

sejumlah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui penerapan teknik manajemen.

George R. Terry (Miftah Thoha, 2010: 5) mengartikan kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan mencakup proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk meningkatkan kelompok dan budayanya.

A. Dale Timple (2000: 58) mendefinisikan Kepemimpinan adalah suatu proses pengaruh sosial dimana manajer mencari partisipasi sukarela dari bawahan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan, seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi.

Menurut Sudarwan Danim (2004:56) kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada individu atau kelompok yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Martinis Yamin dan Maisah (2010:74) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu bentuk strategi atau teori kepemimpinan yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut dengan pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang wewenang

kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk melakukan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan.

Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan bawahan yang bertanggung jawab, sehingga semua bagian pekerjaan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin harus terlebih dahulu menjadi seseorang yang mampu tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya pada bawahannya. Sederhananya, pemimpin yang baik adalah seseorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi membutuhkan pemimpin.

Menurut Kartini Kartono (2003:48), kepemimpinan adalah sebagai berikut::

Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi situasi khusus. Sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitas tertentu, dan punya tujuan serta peralatan khusus, pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristiknya itu merupakan fungsi dari situasi khusus tadi. Jelasnya sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya, juga bersangkutan, serta cocok-pas dengan situasi dan zamannya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu faktor keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada teknik kepemimpinan yang digunakan dalam menciptakan situasi yang menyebabkan orang-orang yang dipimpinnya membangkitkan kesadaran untuk melaksanakan apa yang diinginkan. Dengan kata lain efektif tidaknya seorang pemimpin tergantung pada kemampuannya mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi.

2.1.6. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut (Wahjudin: 2016:266) Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari konteks pengelolaan pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi karena posisi desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa. antar kecamatan, antar kecamatan dan antar kabupaten, dan antar kecamatan. Pembangunan desa memiliki peran penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini sangat luas cakupannya karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita: 2006:3). Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui pendampingan, pengawasan, dan pendampingan.

Keberadaan pembangunan desa memiliki peran penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non fisik yang sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.

Pembangunan masyarakat desa harus ditingkatkan dan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan mengadakan pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan kegiatan yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas dan kesadaran lingkungan akan lebih tinggi. Pendampingan merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya pendampingan. Karena pendampingan ini tidak hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksud adalah pendampingan menyeluruh ke desa.

Di sisi lain, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan ruang yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya di pedesaan. Pemerintah desa memiliki peran dalam mengupayakan terciptanya suasana yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bahu-membahu membangun kawasan pedesaan, dan di sisi lain masyarakat juga berperan aktif agar pembangunan dapat berjalan secara optimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa itu sendiri dan memberikan makna kepada desa sebagai dasar perubahan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

2.1.7. Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *performance* (pelaksanaan suatu tanggung jawab) yaitu suatu pekerjaan yang lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan dilakukan perbaikan-perbaikan agar pencapaian hasil kerja atau kinerja dapat lebih optimal. Penilaian suatu pekerjaan menentukan posisi rasio pekerjaan dalam suatu organisasi menurut Haynes dalam (Sinambela : 2012 : 5).

Gibson dalam Kasmir (2016: 182) menyatakan bahwa kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu.

Menurut Sedarmayanti (2003: 147) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara tidak sah, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya Sedarmayanti (2003:152) kinerja diartikan sebagai hasil kerja seseorang dan merupakan proses pengelolaan suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil

kinerja tersebut dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar kerja, target dan target atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai kinerja kelompok, yaitu hubungan antara kekompakan dan kinerja kelompok, serta perbedaan antara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan individu dan kelompok (Rivai dan Basri, 2005:14).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pekerjaan tersebut dan dapat menghasilkan kepuasan kerja yang akan mempengaruhi tingkat imbalan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Keberhasilan suatu pekerjaan merupakan tujuan yang ingin dicapai individu. Namun dalam proses untuk mendapatkan kesuksesan dari suatu pekerjaan terdapat faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sangat penting untuk diketahui agar pencapaian suatu pekerjaan dapat diperoleh. Kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya (Simanjuntak, 2005):

1. Kualitas dan kemampuan individu. Yaitu yang berkaitan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, dan kondisi fisik pegawai (individu). Kualitas dan kemampuan pegawai yang baik dapat diperoleh dari proses rekrutmen yang tepat dan sesuai dengan standar dan pelatihan rekrutmen pegawai.

2. Fasilitas penunjang, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas kerja dan lingkungan kerja. Dengan adanya fasilitas kerja dan lingkungan kerja yang baik maka kinerja pegawai (individu) akan meningkat.

Dari pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu di atas, peneliti memaknai bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja merupakan faktor-faktor yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja seseorang (individu) dan sangat penting untuk diketahui agar nantinya individu di tempat kerja dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mencapai keberhasilan dari suatu pekerjaan yang dilakukannya.

3. Penilaian Kinerja

Teknik yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan kinerja adalah melalui penilaian motivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan masa depan yang dipengaruhi oleh umpan balik atas kinerja dan pengembangan masa lalu. Penilaian kinerja digunakan untuk membandingkan berbagai pekerjaan dengan menggunakan prosedur formal dan sistematis untuk menentukan urutan tingkatan pekerjaan (Sinambela: 2012: 47).

Penilaian kinerja adalah proses dimana organisasi mengevaluasi kinerja pekerjaan individu. Dalam penilaian kinerja, kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai untuk jangka waktu tertentu. Umpan balik kinerja memungkinkan karyawan untuk mengetahui seberapa baik mereka melakukannya. Penilaian kinerja secara keseluruhan adalah proses yang berbeda dari evaluasi pekerjaan. Penilaian kinerja berkaitan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan tertentu.

Evaluasi pekerjaan menentukan seberapa tinggi harga suatu pekerjaan bagi organisasi (Sinambela, 2012:47).

Penilaian kinerja adalah mekanisme untuk memastikan bahwa orang-orang di setiap tingkat melakukan tugas dengan cara yang diinginkan atasan mereka. Penilaian kinerja menentukan posisi dalam suatu pekerjaan. Penilaian kinerja juga merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan hasil yang adil berdasarkan tingkat pekerjaan dan tingkat prestasi (Sinambela, 2012:34).

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa penilaian kinerja merupakan evaluasi terhadap proses kerja yang dilakukan dalam kaitannya dengan standar pekerjaan yang telah ditentukan. Suatu pekerjaan harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian pekerjaan yang telah dilakukan..

4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dapat dihitung dan diukur. Untuk menetapkan indikator kinerja, harus diidentifikasi suatu bentuk pengukuran yang akan menilai hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan. Indikator kinerja ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja karyawan membuat kemajuan menuju tujuan dan sasaran dalam rencana strategis. Instrumen pengukuran kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja individu. Substansi indikator pengukuran kinerja ini terdiri dari aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur (Sedarmayanti, 2007: 377) diantaranya:

- a. **Prestasi kerja** (*achievement*), yaitu hasil kerja individu dalam melaksanakan tugas baik dari segi kualitas maupun kuantitas kerja. Menurut Hasibuan (2015 : 87) indikator yang mempengaruhi prestasi kerja, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kualitas kerja. Faktor ini meliputi akurasi ketelitian, kerapian dalam melaksanakan tugas, mempergunakan dan memelihara alat kerja dan kecakapan dalam melakukan pekerjaan.
2. Pengetahuan. Kemampuan seorang bawahan dinilai dari pengetahuannya tentang sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan prosedur kerja, penggunaan alat kerja dan kemampuan teknis untuk pekerjaannya.
3. Penyesuaian pekerjaan. Merupakan indikator penilaian kerja dalam hal kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas di luar pekerjaan serta adanya penugasan baru, kecepatan berpikir dan bertindak dalam bekerja.
4. Hubungan kerja. Hubungan kerja yang penilaiannya didasarkan pada sikap bawahan terhadap atasan dan kemudian menerima perubahan dalam pekerjaan.

- b. **Keahlian (*skill*)**, Keterampilan, yaitu kemampuan teknis yang dimiliki individu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Keterampilan ini dapat berupa kerjasama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.

Menurut Hasibuan (2003) mengungkapkan bahwa keahlian mencakup tiga indikator, yaitu :

1. Keahlian teknik (*technical skill*)
Meliputi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus. Semua pekerjaan menuntut sejumlah keahlian khusus, dan banyak individu mengembangkan keahlian teknis mereka dalam pekerjaan.
2. Keahlian kemanusiaan (*human skill*)
Kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain, baik secara individual maupun dalam kelompok.
3. Keahlian konsep (*conceptual skill*)
Kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi yang rumit.

- c. **Perilaku (*attitude*)**, yaitu sikap dan perilaku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.

Menurut Griffiths (2004:41-42), ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perilaku kerja yaitu :

1. *Social relationships* (hubungan sosial)
Seorang pekerja harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan pekerja yang lain ataupun lingkungan sosialnya.
2. *Vocational skill* (keahlian kejuruan)
Keahlian yang dimiliki seseorang sesuai dengan pekerjaannya
3. *Work motivation* (motivasi kerja)

Adanya kemauan untuk bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti kebutuhan fisiologi, rasa aman, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri.

4. *Initiative-confidence* (inisiatif-percaya diri)

Yaitu dalam perilaku kerja yang baik harus memupuk rasa percaya diri yang penuh serta mengambil inisiatif bahwa semua pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan *job description* yang ada.

d. **Kepemimpinan (*Leadership*)**, Ini menyangkut kemampuan manajerial dan seni mempengaruhi orang lain untuk mengoordinasikan pekerjaan secara akurat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Adapun indikator Kepemimpinan (*Leadership*) menurut Thoha (2010:52) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi kepemimpinan sebagai innovator, antara lain mencakup:
 - a) Kemampuan pimpinan dalam berinovasi
 - b) Kemampuan pimpinan dalam konseptual yang seluruhnya dilaksanakan dalam upaya mempertahankan dan atau meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Fungsi kepemimpinan sebagai komunikator, antara lain mencakup:
 - a) Kemampuan menyampaikan maksud dan tujuan komunikasi
 - b) Kemampuan pimpinan dalam memahami, mengerti dan mengambil intisari pembicaraan.
3. Fungsi kepemimpinan sebagai motivator, antara lain mencakup:
 - a) Kemampuan pimpinan mendorong agar bekerja sesuai tanggung jawab.
 - b) Kemampuan pimpinan memberikan sumbangan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
4. Fungsi kepemimpinan sebagai kontroler antara lain mencakup:
 - a) Kemampuan pimpinan dalam melakukan pengawasan.
 - b) Kemampuan pimpinan dalam pemakaian sumber daya

Berdasarkan penjelasan indikator kinerja menurut Sedarmayanti dapat diartikan bahwa kinerja individu merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang yang sesuai dengan keahlian, perilaku dan kepemimpinan yang dimiliki individu tersebut. Kinerja harus memberikan pelayanan publik tanpa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Penulis memilih menggunakan indikator pada pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh

Sedarmayanti karena dinilai lebih tepat, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja pendamping dalam pemberdayaan masyarakat.

2.1.8. Konsep Pendamping Desa

Pendamping Desa merupakan suatu jabatan di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang bertugas membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional adalah tenaga pendamping Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan pasal 128 ayat (2) yang dimaksud dengan asisten profesional adalah:

1. Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
2. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
3. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat pada Pasal 10 Ayat 2

Pasal 10 ayat 2

Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengimplementasikan kebijakan dan peraturan Kementerian dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

Pasal 10B

(1) Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa;
- b. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
- c. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan
- d. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pendamping desa adalah pembantu, yaitu membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat sebenarnya merupakan tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan pendampingan secara bertahap sesuai kebutuhan, yang secara teknis dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dapat dibantu oleh asisten profesional atau yang disebut dengan pendamping desa.

Pendamping Desa bukanlah pegawai negeri sipil atau pejabat publik, melainkan hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan kompeten di bidang pembinaan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk ditugaskan di membantu pemerintah dalam membantu Desa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa.

1. Status Pendamping Desa

Status pendamping Desa yaitu tenaga, pendampingan Desa bekerja dengan pemerintah dengan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibanya untuk membantu Desa dampunganya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dibuat dan disepakati.

2. Tugas Pendamping Desa

Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kemetrian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa pada Pasal 11 dijelaskan mengenai tugas Pendamping Desa yaitu : Mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Suherman (2004:14) ada 10 (sepuluh) hal yang perlu diperhatikan fasilitator agar pelaksanaan kegiatan pendampingan berjalan efektif, yaitu:

1. **Menghayati Kebutuhan Masyarakat**
Memahami kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh seorang pendamping. Banyak ilmu pengetahuan yang dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam berbagai hal. Pemberian pengetahuan ini diberikan untuk meningkatkan kepekaan terhadap situasi yang dihadapi dan menentukan jenis keputusan dan apa yang dibutuhkan dengan cepat. Model ini kemudian diadaptasi dalam berbagai pelatihan berbasis masyarakat melalui identifikasi, analisis kebutuhan, dan perumusan tindakan. Asisten harus benar-benar memenuhi harapan masyarakat dan berempati dengan kebutuhan mereka.
2. **Menyadari Kekuatan dan Kelemahan Anda**

Dalam hal ini, sebelum seorang pendamping terjun langsung menangani permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat, seorang pendamping harus mengetahui identitas setiap pendamping. Hal-hal positif apa yang dimiliki yang dapat menunjang tugas, seperti wawasan, motivasi, keterampilan merupakan modal dasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan kelemahan yang dirasakan dijadikan sebagai tanda yang harus dihindari, bahkan sebagai cambuk untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan. Lebih mudah bagi orang untuk memahami informasi secara sederhana dan menyentuh kebutuhan mereka.

3. **Bekerja dengan penuh tanggung jawab**

Sebuah tugas adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh seorang pendamping. Seorang asisten yang bertanggung jawab akan mampu membuat keputusan dan menetapkan tujuan dengan tepat. Yang harus dilakukan adalah bekerja sesuai dengan kerangka pendampingan dengan memperhatikan etika sebagai pendamping masyarakat. Menerima tanggung jawab berarti memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah menerima dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

4. **Menikmati Tugas**

Seorang pendamping ketika telah berinteraksi dengan komunitas pendamping harus menikmati tugas pendamping. Kenikmatan dalam melaksanakan tugas akan terasa ketika ia mampu memberikan yang terbaik kepada orang lain, dalam dirinya lebih menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan dengan memadukan aspek ilmu sebagai landasan pijaknya. Berusaha membuat situasi menjadi menyenangkan saat mengerjakan tugas, agar tugas yang dihadapi tidak menjadi beban

5. **Kebanggaan dalam Kinerja**

Bekerja dengan masyarakat adalah tugas mulia. Kebanggaan ini digambarkan sebagai sikap kerendahan hati. Mentor harus memiliki citra diri yang harus diterapkan pada tugas. Melaksanakan tugas pendampingan dengan baik dan benar merupakan kinerja yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih baik

6. **Menyesuaikan Diri**

Penerimaan masyarakat terhadap kehadiran pendamping tergantung pada bagaimana pendamping dapat menyesuaikan diri dengan tepat. Sosialisasi dilakukan secara bertahap melalui penyesuaian lingkungan dan pemahaman terhadap kebiasaan masyarakat setempat. Pendamping harus mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat.

7. **Menetapkan Prioritas**

Menyusun skala prioritas kegiatan pendampingan sesuai dengan tingkat dan beratnya permasalahan yang dihadapi masyarakat dan fasilitator itu sendiri. Tentukan aspek yang lebih penting untuk segera diprioritaskan. Kemampuan mengembangkan dan menetapkan prioritas harus memperhatikan dua hal. Hal yang harus dipenuhi adalah apakah kegiatan

tersebut sesuai dengan masyarakat dan juga ketepatan waktu pelaksanaannya

8. **Membangun Kemitraan**

Pendampingan juga berarti upaya menjalin hubungan antar individu, antar lembaga dan antar kelompok yang berbeda. Pendamping harus selalu berusaha membangun relasi guna memudahkan pekerjaan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber informasi dan teknologi yang berguna bagi kehidupan pendamping. Membangun dengan organisasi lokal, pemerintah daerah, dan juga institusi tertentu adalah hal yang paling penting. Relasi yang dibangun dimaksudkan untuk mengembangkan jejaring sosial yang secara langsung berdampak pada perubahan komunitas yang dibinanya. Tanpa dukungan masyarakat, sebaik apapun program tersebut tidak berarti apa-apa, dan akan sulit untuk berjalan seperti yang diharapkan.

9. **Memiliki Keyakinan Positif**

Selalu berpikir positif agar apa yang Anda lakukan berdampak baik, karena dalam hal ini yang Anda hadapi adalah orang-orang dengan berbagai karakter. Berpikir positif akan sangat membantu kemampuan pendamping dalam bekerja. Sedangkan kebutuhan untuk percaya positif adalah keyakinan bahwa berpikir positif dapat berhasil. Dalam arti semuanya akan terwujud jika dilakukan dengan penuh keyakinan dan persiapan yang matang.

10. **Belajar**

Bagi seorang pendamping, belajar sudah menjadi bagian dari hidup dan profesinya. Tuntutan penguasaan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat harus menjadi perhatian utama seorang pendamping. Informasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu akan mendorong pendampingan untuk terus mengembangkan akses dan menambah wawasan serta kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Pelajaran yang dilaksanakan seperti pelatihan khusus, seminar, workshop yang dilaksanakan dapat membantu meningkatkan profesionalisme dalam bidang pekerjaan yang ditekuni.

3. **Kewajiban dan Hak Pendamping Lokal Desa**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Lokal Desa Nomor 21/14/PLD/PPPMD/PPK-III/II/2021 dijelaskan mengenai Kewajiban dan Hak Pendamping Lokal Desa sebagai berikut:

Pasal 3 **Kewajiban**

- a. Memberi data dan informasi yang benar dan lengkap serta bertanggungjawab penuh terhadap data-data yang diberikan jika terdapat permasalahan dikemudian hari;
- b. Memasukkan data dan informasi terbaru kedalam aplikasi Laporan Harian yang meliputi Nama Lengkap, NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon dan email
- c. Bertempat tinggal di salah satu desa dampingan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan kewajiban memberitahukan alamat tempat tinggal di lokasi tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen
- d. Bekerja dengan jumlah waktu kerja minimal 7 jam/hari atau 40 jam/minggu;
- e. Melakukan supervisi, monitoring asistensi teknik dan pemberdayaan pada lokasi desa, dan kunjungan koordinasi ke Desa-Desa paling sedikit 15 hari dalam setiap bulannya;
- f. Menyimpan dan memberikan semua dokumen laporan dan tanda bukti hasil pekerjaan untuk sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh para pihak yang berkepentingan;
- g. Memiliki dan menyediakan peralatan kerja pribadi serta bertanggungjawab atas pengelolaan alat-alat kerja dan inventaris kantor.
- h. Memiliki jaminan perlindungan asuransi;
- i. Mengajukan cuti diluar tanggungjawab negara secara tertulis

Pasal 4 **Hak**

- a. Mendapatkan pelatihan atau pembekalan termasuk penjelasan terkait point penting pada Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional dan Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kinerja Pendamping Profesional;
- b. Menerima imbalan jasa berupa Honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi;
- c. Mendapatkan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan cuti yang meliputi cuti tahunan, cuti bersama cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti lainnya.

4. Struktur Organisasi Pendamping Lokal Desa

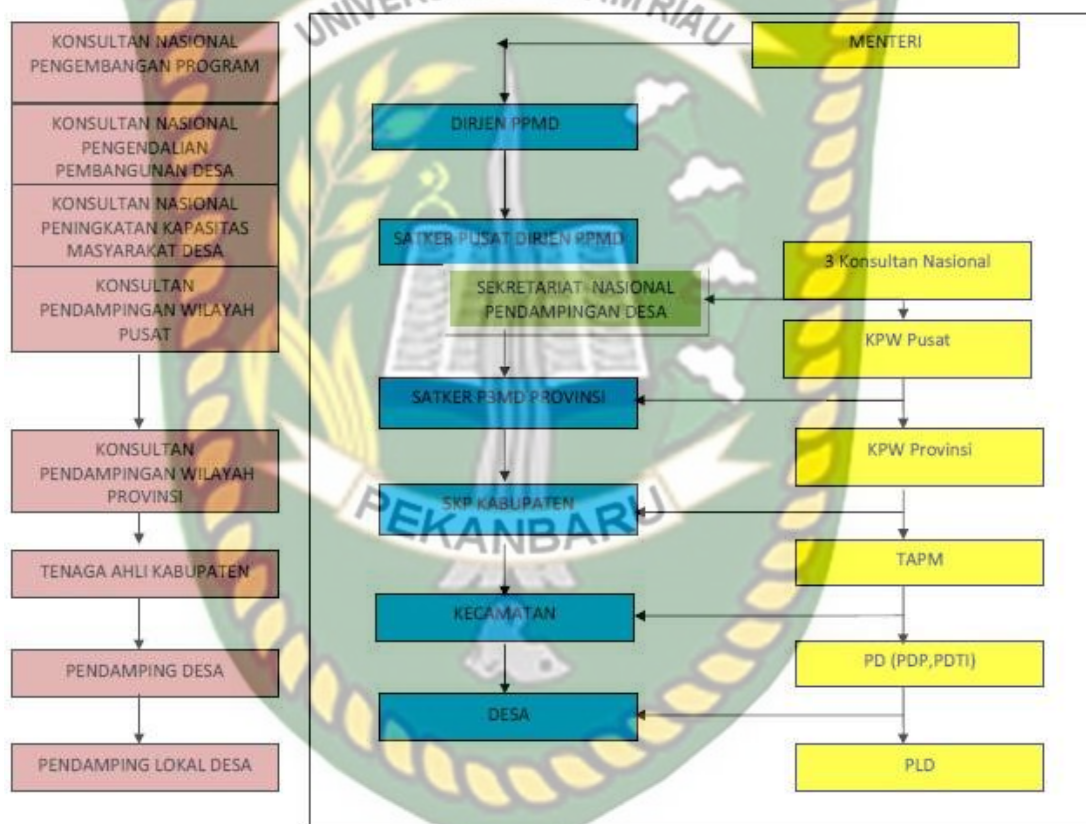
Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Menyediakan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan

di Desa. Pembinaan dan pengelolaan PLD dilaksanakan oleh Satker P#MD Provinsi melalui mekanisme Dekonsentrasi.

Adapun struktur Organisasi Pendamping Desa akan dijelaskan pada gambar 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI PENDAMPING DESA



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2022

2.1.9. Konsep Pemberdayaan

Secara etimologis Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi “pemberdayaan”

artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan, (Rosmedi:2006:1).

Menurut Edi Suharto (2005:57), secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata (*power*) (kekuasaan atau keberdayaan). Adapun pengertian pemberdayaan menurut Suharto sebagai berikut:

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial”, Edi Suharto (2010:59-60).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, (Edi:2005:57) .

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam (Edi:2005:58), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta

lembagalembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Adapun cara yang di tempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di miliknya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

2.1.10. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut widjaja (2002:77) pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawaran bawah yang intinya pemberdayaan upaya membnagkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandirian, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pengertian pemberdayaan menurut Priyono (1996:97), yang menganalisa pengertian pemberdayaan (*empowerment*), yaitu:

“Pemberdayaan merupakan sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemberdayaan juga memiliki makna melindungi dan membela dengan cara berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah”.

Sunyoto Usman dalam (Huraerah, 2008:87) dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat pada Pasal 1 Ayat 15

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat berkemampuan dan berkekuatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam (Sutrisno,2005:18) ada lima macam yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) pada kondisi ini pengelola dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan dirumuskan sebelumnya
- b. Partisipasi (*participation*): dimana setiap actor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep berkelanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonom.
- d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, ketidakberdayaan warga negara tidak dapat dilihat sebagai kodrat, tetapi harus dilihat sebagai akibat dari hubungan kekuasaan. Persoalannya, apakah relasi kuasa yang berkembang

memang memungkinkan terjadinya proses yang membuat orang yang memiliki kekuasaan menjadi tidak berdaya (dalam konteks negara demokrasi), atau apakah proses yang ada cenderung tidak menghilangkan kekuasaan rakyat atau sebaliknya.

Selanjutnya Pambudi (2003:54) mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki pengertian sebagai berikut:

Pertama, pemberdayaan berarti ke dalam, artinya upaya mentransformasikan kesadaran masyarakat sekaligus mendekatkan masyarakat pada akses untuk meningkatkan taraf hidupnya. Transformasi kesadaran berarti tindakan mengembangkan pendidikan politik, mengembangkan wacana-wacana alternatif, sehingga dominasi atau hegemoni negara dapat diatasi. Langkah-langkah ini dilakukan dengan tujuan utama:

- a. Memungkinkan masyarakat menjadi otonom (otonom) untuk mengatur diri sendiri dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat dalam menghadapi situasi sulit, dan mampu melawan berbagai kecenderungan yang merugikan.
- b. Mengizinkan pengungkapan aspirasi dan cara memperjuangkannya dengan memberikan semacam jaminan bahwa kepentingan rakyat tidak akan diabaikan.
- c. Memungkinkan penyelesaian masalah dalam dinamika pembangunan yang mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan, melainkan sebagai subyek pembangunan yang juga memiliki kemampuan.

Kedua, pemberdayaan berarti keluar sebagai upaya untuk mendorong perubahan kebijakan yang selama ini sangat merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam pengertian ini berarti reformasi kebijakan yang didasarkan pada upaya memperluas ruang partisipasi masyarakat. Sebuah upaya reformasi kebijakan tentu memiliki dua makna sekaligus. Makna mundur, berarti suatu bentuk koreksi (dasar) atas kebijakan lama. Sedangkan makna masa depan adalah mendorong proses dan

skema baru agar pembuatan kebijakan tidak lagi menggunakan skema lama, tetapi menggunakan skema baru yang lebih banyak melibatkan masyarakat.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pengembangan masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi jaringan dan kekuatan yang terletak pada setiap individu. Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan menjadi keharusan untuk lebih berdaya melalui upaya mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.

Pambudi (2003:555-56), memberikan cakupan aspek ketidakberdayaan masyarakat, untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi orientasi pemberdayaan masyarakat:

- a. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sangat rendah. Fokus masalah ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendapatan, kesehatan, dan sebagainya.
- b. Masalah akses sumber daya, sebagian elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian lainnya tidak memiliki akses dan terpinggirkan.
- c. Soal kesadaran, massa umumnya percaya bahwa keadaan mereka berhubungan dengan nasib. Beberapa elit mensosialisasikan masalah ini secara sistematis, baik melalui lembaga pendidikan, media massa atau media lainnya. Kemampuan massa rakyat untuk memahami masalah yang mereka hadapi sangat terbatas. Akibatnya banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan secara substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (membantu karena kasih sayang).
- d. Masalah partisipasi, pada umumnya masyarakat sangat sedikit atau tidak ada keterlibatan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Dapat dikatakan bahwa nasib rakyat ditentukan oleh elit.
- e. Masalah kapasitas untuk berpartisipasi dalam memberikan kontrol dan pengendalian proses pemerintahan, kekuasaan dan berbagai hubungan yang ada.

Beragam definisi pemberdayaan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Kartasasmita (1995:19), upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan tiga cara:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah manusia dan masyarakat memiliki potensi (kekuatan) yang dapat dikembangkan, maka pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan tersebut dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya.
2. Penguatan potensi yang dimiliki masyarakat dengan melakukan langkah-langkah konkrit, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana, baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat kelas bawah . Terbukanya akses terhadap berbagai peluang akan membuat masyarakat lebih berdaya, seperti ketersediaan dana, lembaga pelatihan dan pemasaran di pedesaan.
3. Melindungi dan membela kepentingan yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak semakin lemah atau semakin terpinggirkan melawan yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah sangat mendasar dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah persaingan tidak sehat dan eksploitasi yang lemah.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian mengenai Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, akan dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	4	5
1	Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah) <i>oleh Deni Triyanto 2018. Jurnal ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2</i>	Sama-sama membahas tentang Kinerja Pendamping Desa	Perbedaan lebih menekankan tentang kinerja Pendamping Desa dalam membangun kemandirian desa	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa belum maksimal, kerjasama yang baru di lakukan yaitu baru sebatas kerjasama dengan masyarakat desa dan pemerintah desa, belum melakukan kerjasama dengan pihak luar desa untuk meningkatkan ekonomi desa, karena terkendala mengenai rumitnya regulasi dari pemerintah daerah, manajerial desa yang lemah dan belum tersedianya kader-kader yang berkualitas di Desa Taba Jambu.
2.	Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso <i>oleh Izzan Aufa Mahsa Arifin. 2021. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember</i>	Sama-sama membahas tentang Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perbedaan lebih menekankan tentang kinerja Pendamping Desa dalam membangun kemandirian desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa sudah maksimal. Pendamping desa melakukan proses pendampingan dengan mandiri tanpa bantuan orang lain karna sudah memiliki kemampuan masing-masing. (Komitmen kerja) pendamping desa komitmen kerja dan tanggung jawabnya sudah sangat baik. Pada indikator (kualitas) dan (kuantitas) pendamping Desa Wringin sangat baik kualitas pendampingannya dan di kecamatan wringin jumlah pendamping desa dan SDM sudah sesuai kebutuhan. Sedangkan factor yang mempengaruhi kinerja, pada faktor kualitas dan kemampuan sudah sangat baik. Selanjutnya sarana pendukung sudah tersedia dalam pelaksanaan pendampingan desa.
3.	Efektifitas Kinerja Pendamping Lokal	Sama-sama membahas	Perbedaan lebih	Kinerja pendamping desa setempat dapat dilihat dari beberapa

	<p>Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) <i>oleh Lutfi Hilman, Yaqub Cikusin, Agus Zainal Abidini 2019. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. ISSN 2302-8432. Volume 13, No. 3, Tahun 2019, Hal 90-95</i></p>	<p>tentang Kinerja Pendamping Desa</p>	<p>menekankan tentang efektifitas Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa</p>	<p>indikator antara lain Kejelasan Tujuan: tujuan pendampingan desa sesuai dengan Permendes Nomor 3 Tahun 2015, Strategi Pencapaian: strategi yang dilakukan pendampingan desa adalah menyesuaikan dengan aturan dimana strategi baik Musdes, RKPDes, dan APBDes, Analisis dan Perumusan Kebijakan: analisis dan perumusan kebijakan selalu berpihak pada kepentingan desa dan masyarakatnya dan pihak pendamping selalu terlibat dalam perumusan kebijakan Perencanaan: perencanaan yang dilakukan oleh pendamping desa ada di bersama dengan RKPDes di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Sarana : Sarana prasarana pendampingan desa masih kurang, Sistem Monitoring dan Pengendalian : pengawasan dalam program di desa dilakukan oleh pemerintah daerah dan jambu desa pendamping desa dengan PDTI (Teknik Infrastruktur Pendamping Desa).</p>
4.	<p>Kinerja Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang. <i>Oleh: Mohammad Fauzi Alvi Yasin, dkk. 2019. Jurnal Citizen Charter Vol 1 No 1 July 2019.</i></p>	<p>Sama-sama membahas tentang Kinerja Pendamping Desa</p>	<p>Perbedaan penelitian adalah mengenai pembahasan kinerja Pendamping Desa dan Kinerja Pendamping Lokal Desa</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja PD dan PLD yang bertugas secara umum dinilai sudah cukup baik. Indikator kualitas, ketepatan waktu, dan komitmen kerja menjadi yang paling banyak diapresiasi oleh para pengguna jasa yaitu Kepala Desa dan Camat. Sementara untuk indikator kemandirian, masih ditemukan beberapa petugas pendamping yang masih menunggu instruksi dalam bekerja,</p>
5.	<p>Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. <i>Oleh: Ramanthia. 2021. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/386/1913</i></p>	<p>Sama-sama membahas tentang Kinerja Pendamping Desa</p>	<p>Perbedaan penelitian adalah mengenai indikator kinerja yang digunakan</p>	<p>Hasil penelitian Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bukit Rawi dinilai sukses dalam memberdayakan masyarakat desa. Faktor yang menghambat kinerja pendamping desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pemahaman pendamping terhadap program, pemahaman pendamping terhadap karakter budaya setempat, pemahaman pendamping terhadap wilayah geografis, dan kemampuan</p>

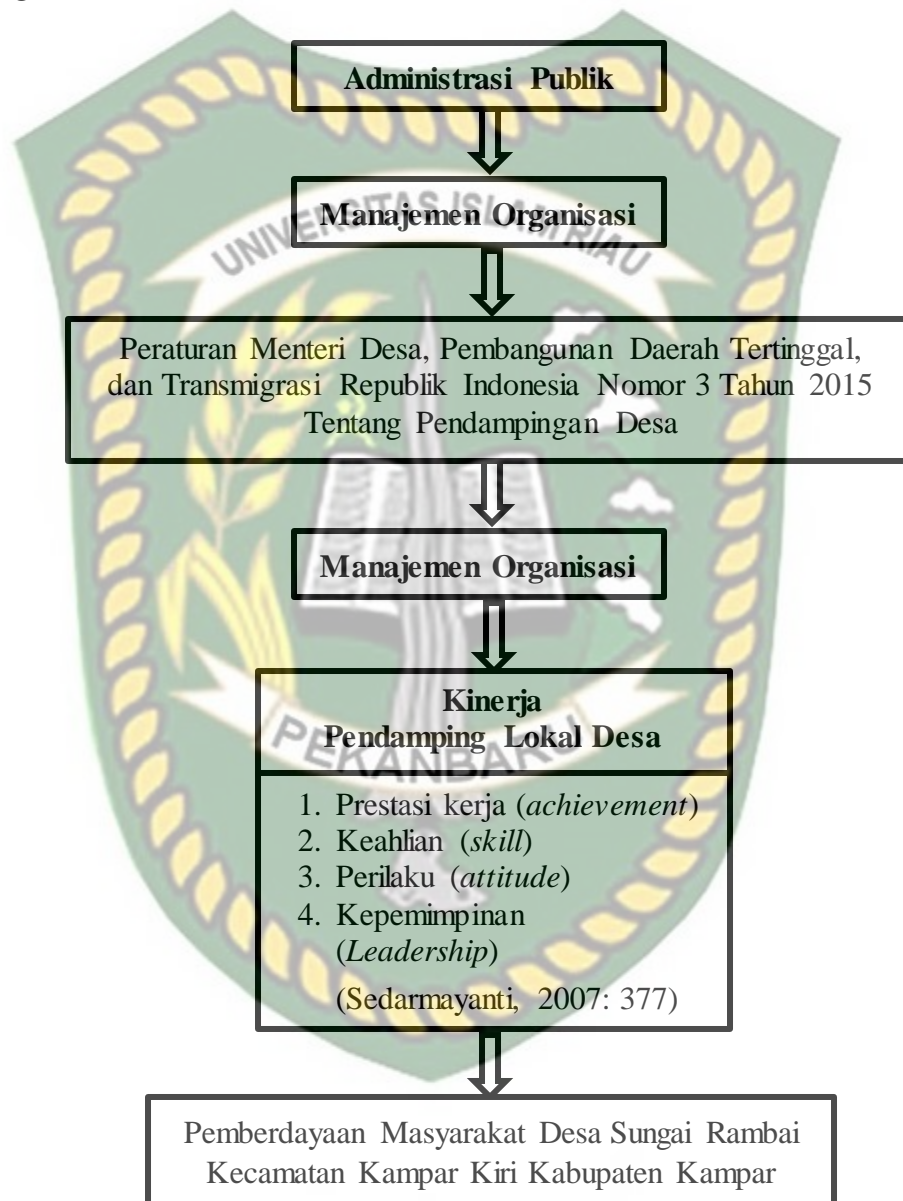
				komunikasi dan sosialisasi pendamping. .
6.	Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima) <i>Oleh: Irfan, dkk. 2020. Jurnal Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP Bima. ISSN Online 2599-2511</i>	Sama-sama membahas tentang Pendamping Desa	Perbedaan penelitian adalah pada analisis kajian penelitian yaitu mengenai peran Pendamping Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Peran pendamping Desa belum efektif karena pendamping Desa tidak melaksanakan fungsing secara terpadu dan bersama-sama dengan pemerintah Desa dalam membangun Desa mandiri, namun keberadaan pendamping Desa hanya sebagai tim survey, pengambilan data untuk kebutuhan pelaporannya, 2. Kendala pendamping Desa dalam melaksanakan peran dan fungsingnya adalah keberadaan jalan yang dilalui dari Desa yang satu dengan desa yang lain cukup jauh dan jalan yang dilalui cukup rusak, adanya rasa malas yang tinggi, kesadarann bekerja masih kurang, keterbatasan SDM, kedisiplinan kerja yang masih diabaikan, rendahnya tanggungjawab bekerja
7	Efektifitas Pendamping Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis <i>oleh Rezky Susanti 2015. Jom FISIP Volume 2 No 1- Februari 2015. Jurusan Sosiologi-Program Studi Sosiologi- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau</i>	Sama-sama membahas tentang Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa	Perbedaan lebih menekankan tentang efektifitas poeran pendamping Desa	Efektivitas pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dalam penguatan infrastruktur pedesaan masih kurang efektif : Pengetahuan masyarakat yang masih kurang tahu tentang keberadaan pendamping desa, kehadiran pendamping desa, pendampingan pada pelaksanaan program, pendampingan pada pengawasan pembangunan, komunikasi pendamping desa, dinilai kurang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa kurang aktif, dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan penyampaian kecurangan pada pembangunan infrastruktur masih kadang-kadang dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam penerimaan hasil pembangunan oleh masyarakat dinilai tinggi dilihat dari respon masyarakat yang hampir selalu menerima hasil pembangunan infrastrukturdesa.
8	Sarjana Pendamping Desa sebagai	Sama-sama membahas	Perbedaan lebih	Hasil penelitian yaitu pendamping desa peranannya penting dan

	<p><i>community development dalam pemberdayaan masyarakat oleh Bambang Suswanto dan Endang Dwi Sulistyoningsih 2018. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII" 14-15 November 2018 Purwokerto. No. ISBN: 978-602-1643-617.</i></p>	<p>tentang pendamping desa</p>	<p>menekankan tentang Sarjana pendamping desa sebagai salah satu stakeholder dan aktor pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan merupakan community development atau pengembangan masyarakat</p>	<p>dibutuhkan selain untuk menejemen administrasi dan keuangan pembangunan desa, juga untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kemitraan dan kemandirian. Pendamping desa memerlukan koordinasi dan kerjasama untuk membentuk forum komunikasi serta kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap permasalahan, potensi dan prospek dalam pembangunan masyarakat desa. Belum adanya kohesivitas dan kerjasama secara aktif antara pendamping desa, masyarakat dan pemerintah desa. Sehingga membutuhkan forum komunikasi yang terbuka, dialogis dan partisipatif.</p>
--	--	--------------------------------	--	--

Sumber: Dari berbagai Jurnal

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, konsep teori, maka disusun kerangka pemikiran seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

2.4. Konsep Operasional

Agar mendapatkan batasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep sebagai berikut :

1. Kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika.

Adapun indikator kinerja dalam penelitian ini merujuk pada indikator kinerja menurut Sedarmayanti, (2007: 377) meliputi:

- a. **Prestasi kerja** (*achievement*), yaitu hasil kerja individu dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
 - b. **Keahlian** (*skill*), yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.
 - c. **Perilaku** (*attitude*), yaitu sikap dan tingkah laku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian di sini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.
 - d. **Kepemimpinan** (*leadership*), ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan secara tepat dan cepat pengambilan keputusan dan prioritas.
2. Pendampingan dalam penelitian ini adalah suatu cara yang ditempuh dalam suatu kegiatan yang dilakukan dengan arti mengarahkan, mengajar, dan

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan menempatkan pendamping desa sebagai fasilitator sehingga pemerintah desa dan masyarakat mampu melaksanakan program pembangunan desa ke arah yang lebih baik.

3. Pendamping Desa adalah pembantu, yaitu membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan desa.
4. Pendamping Lokal Desa adalah Pembantu Desa yang ditugaskan di Desa untuk membantu Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama Desa, pembinaan BUM Desa, dan pembangunan lokal berskala Desa.
5. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

7. Desa Sungai Rambai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar yang melaksanakan kegiatan Pendampingan Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

2.5. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel yang dikaji dalam Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2. Operasionalisasi Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Kinerja (<i>performance</i>) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika, Sedarmayanti (2003: 147)	Kinerja Pendamping Lokal Desa	1. Prestasi kerja (<i>Achievement</i>)	a. Kualitas kerja Pendamping Lokal Desa meliputi : ketelitian, kerapian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	Ordinal
			b. Pengetahuan Pendamping Lokal Desa terhadap tugas dan prosedur kerja, penggunaan alat kerja maupun kemampuan teknis dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	Ordinal
			c. Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas diluar pekerjaan, adanya tugas baru, kecepatan berpikir dan bertindak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	Ordinal
			d. Sikap Pendamping Lokal Desa kepada pimpinan dalam menerima perubahan kerja.	Ordinal
		2. Keahlian (<i>Skill</i>)	a. Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam menerapkan	Ordinal

			pengetahuan atau keahlian khusus pemberdayaan masyarakat Desa	
			b. Kemampuan Pendamping Lokal Desa untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi masyarakat, baik secara individual maupun dalam kelompok	Ordinal
			c. Kemampuan Pendamping Lokal Desa untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi yang rumit	Ordinal
		3. Perilaku (<i>Attitude</i>)	a. Hubungan sosial Pendamping Lokal Desa dengan tim kerja maupun masyarakat Desa	Ordinal
			b. Kejujuran Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	Ordinal
			c. Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	Ordinal
			d. Rasa percaya diri dan inisiatif yang dimiliki Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas	Ordinal
		4. Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	h. Kemampuan Pendamping Lokal Desa melakukan inovasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	Ordinal
			i. Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam menyampaikan program-program pemberdayaan masyarakat serta memahami berbagai permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa	Ordinal

			j. Kemampuan Pendamping Lokal Desa memotivasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan Desa	Ordinal
			k. Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam mengawasi dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ordinal

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2021

2.6. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap setiap indikator dimensi variabel penelitian Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Menurut Singarimbun (1987:102) ukuran ordinal yaitu suatu teknik pengukuran dengan cara mengurutkan dari tingkatan “paling rendah” ke tingkat “paling tinggi” ataupun sebaliknya. Lima kategori nilai : 5 = Sangat Baik, 4 = Baik 3 = Cukup Baik 2. = Kurang Baik, 1 = Tidak Baik

Dalam pengukuran semua dimensi variabel di atas adalah menggunakan 5 point *Likert Scale*, dimana terdapat lima pilihan jawaban antara lain sebagai berikut :

1. Kategori jawaban Sangat Baik (SB)
2. Kategori jawaban Baik (B)
3. Kategori jawaban Cukup Baik (CB)
4. Kategori jawaban Kurang Baik (KB)
5. Kategori jawaban Tidak Baik (TB)

Tabel 2.3. Tabel Skala Likert

No	Jawaban	Kategori Jawaban
5	SB	Sangat Baik
4	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
2	KB	Kurang Baik
1	TB	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Sugiyono (2005 : 86)



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik (Azwar, 2007:5). Menurut Subana dan Sudrajat (2005:25) penelitian kuantitatif ditinjau dari tujuan, penelitian ini digunakan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau menggambarkan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan ada pula yang mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, (Lexy:2011:14). Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Desa di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Penentuan lokasi penelitian ini, berdasarkan Observasi awal Penulis bahwa Desa Sungai Rambai masih berstatus Desa Tertinggal dan saat ini sedang dilaksanakan kegiatan Pendampingan Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Rambai. Namun dengan

adanya Pendamping Loka Desa di Desa Sungai Rambai tersebut, berdasarkan pengamatan peneliti dan juga wawancara awal yang dilakukan peneliti bersama aparaturnya pemerintahan Desa Sungai Rambai dan juga masyarakat Desa Sungai Rambai, diketahui bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai belum optimal. Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai belum mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa dengan baik sehingga hasil yang diharapkan dari dilaksanakannya kegiatan pendamping desa di Desa Sungai Rambai belum tercapai.

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:96), definisi populasi yaitu sebagai berikut : "Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi yang dimaksud tersebut yaitu Pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, aparaturnya Pemerintahan Desa Sungai Rambai, Tokoh Masyarakat beserta masyarakat Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasi tersebut. Sugiyono (2016:115) menyatakan bahwa sampel adalah: "Sebagian dari jumlah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi". Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 26 orang, dimana jumlah tersebut terdiri dari: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar, Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Rambai, Pendamping Desa Kecamatan Kampar Kiri, Tokoh Masyarakat beserta masyarakat Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Jumlah		Teknik Pengambilan Sampel	Pengambilan Data
		Populasi	Sampel		
	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar.	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Wawancara
	Pendamping Desa Kecamatan Kampar Kiri				
	1) Pendamping Lokal Desa Teluk Paman	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Quisioner/ Wawancara
	2) Pendamping Pemberdayaan Masyarakat	2 orang	2 orang		
	3) Pendamping Teknik Infrastruktur	1 orang	1 orang		
	Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Rambai:			<i>Sensus Sampling</i>	Quisioner/ Wawancara
	1) Kepala Desa	1 orang	1 orang		
	2) Sekretaris Desa	1 orang	1 orang		
	3) Bendahara Desa	1 orang	1 orang		
	4) Ketua BPD	1 orang	1 orang		
	5) Ketua LPM	1 orang	1 orang		
	6) Ketua TPK	1 orang	1 orang		
	Tokoh Masyarakat Desa Sungai Rambai	12 orang	5 orang	<i>Purpose Sampling</i>	Quisioner/ Wawancara
	Masyarakat (Kepala Keluarga/KK)	592 orang	10 orang	<i>Purpose Sampling</i>	Quisioner/ Wawancara
	Jumlah	615 orang	26 orang		

Sumber: Pengolahan Penelitian Tahun 2021

3.4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengambilan sampel. Untuk Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar, Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Rambai dan Pendamping Desa Kecamatan Kampar Kiri pengambilan data sampel dilakukan dengan metoda teknik sampling jenuh atau sensus Sampling. Sugiyono (2008:122), sampling jenuh atau sensus adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel.

Sementara untuk Tokoh Masyarakat Desa Sungai Rambai dan masyarakat (Kepala Keluarga) di Desa Sungai Rambai pengambilan sampel penelitian dilakukan

dengan metoda metoda *purposive sampling*. Metoda *purposive sampling* menurut Sugiyono (2016:85) adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan kinerja Pendamping Desa Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Menurut (Sugiyono:2016:402) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan :

- 1). Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara dan tanya jawab secara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka). Data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan kinerja Pendamping Desa Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- 2). Data Sekunder; adalah data yang digunakan peneliti yang diperoleh melalui literatur-literatur, buku-buku serta sumber-sumber lain yang terkait dengan

kinerja Pendamping Desa Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, berupa dokumen, jurnal, catatan buku arsip yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dari lokasi penelitian harus diterapkan teknik pengumpulan data. Menurut (Sugiyono: 2016: 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Untuk memperoleh data di lapangan dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti terkait, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden/informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi, (Syahendri:2014:22). Kegiatan observasi dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan sebelum penelitian dimulai (survey awal penelitian) hingga penelitian berakhir. Seluruh fenomena dan gejala yang berhubungan dengan tema penelitian yang ditemui dilokasi penelitian, dijadikan sebagai masukan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

2. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lebih valid dari informan dan memperkuat data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Wawancara terhadap informan dilakukan dengan semiterstruktur (*semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, cerita, biografi, monografi, peraturan dan kebijakan. Menurut (Sugiyono:2016:82), bahwa : “Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh data-data dokumen mengenai, peraturan dan kebijakan pemerintah terkait efektivitas Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sungai Rambai.

3.7. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sebelum menjelaskan

berbagai teknik analisis data, dapat dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian analisis data.

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain, (Sugiyono:2016:244).

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono: 2016:246-253) mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan dalam analisis data, yaitu:

1. ***Data Reduction* (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

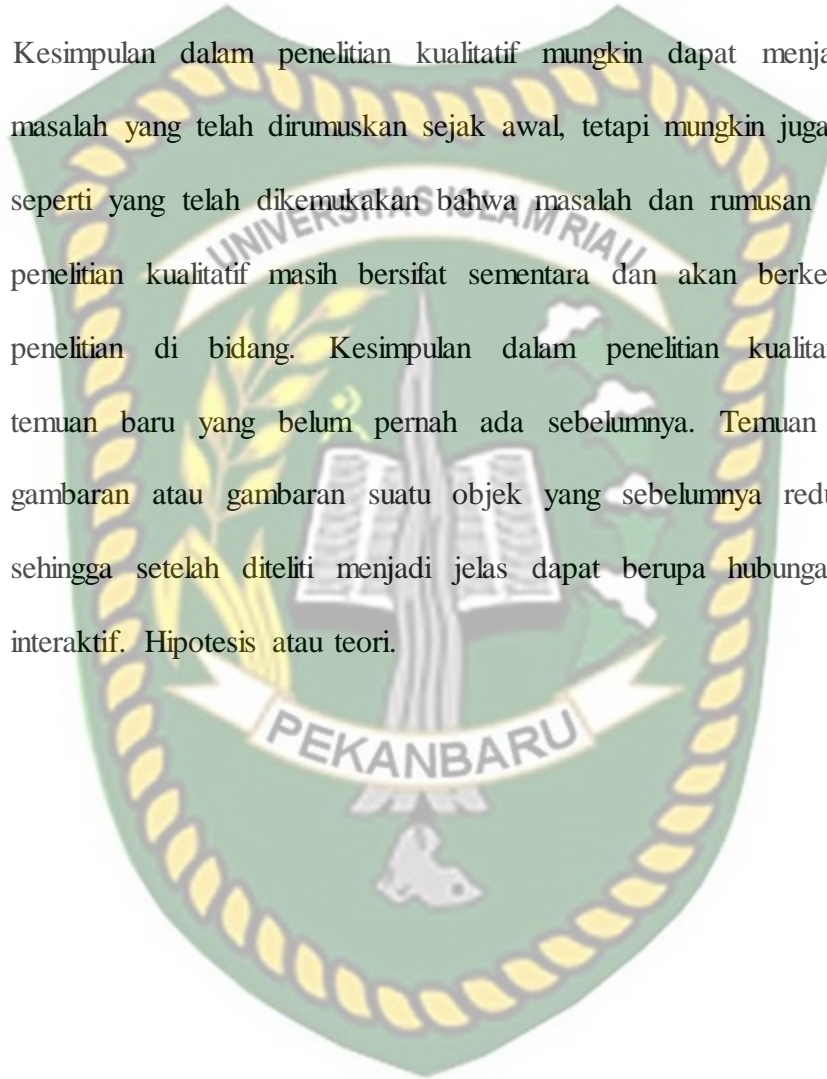
2. ***Data Display***

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan

menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian dapat dibantu dengan menyertakan tabel atau gambar.

3. *Conclusion Drawing/Verivication*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di bidang. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya redup atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Hipotesis atau teori.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas

4.1.1. Sejarah Desa Sungai Rambai

Desa Sungai Rambai sebelumnya adalah Kesultanan VIII Koto Setingkai yang terdiri dari Delapan Nagari (Kampung) yang terbagi dalam Dua (2) Kategori, Kategori Pertama (I) diantaranya adalah Balung sampai sekarang masih Desa Balung, Padadieh sekarang sudah Gabung kebalung, Kotuo yang sekarang sudah Gabung ke Balung, Siasam yang telah lama hilang dan sekarang sudah kembali menjadi Dusun Siasam dibawah Naungan Desa Balung yang terdiri dari 4 (Empat) Kampung itu disebut dengan IV Koto Dimudiek (4 kampung dihulu sungai Setingkai).

Sedangkan Kategori Kedua (II) adalah : Lubuk Agung, sampai sekarang, Sungai Rambai yang sekarang menjadi Desa Sungai Rambai, Koto Bomban dan sekarang menjadi Desa Sungai Raja kemudian Desa Sungai Sarik yang sekarang menjadi Desa Sungai Sarik yang disebut dengan IV Koto di Ulak (4 kampung dihilir Sungai Setingkai). Yang delapan (8) kampung tersebut menjadi Satu (1) Desa dengan ibu Kedesaan adalah Balung dengan ibu Kecamatan XII Koto Kampar.

Pada Tahun 1968 IV Koto di Ulak (4 kampung dihilir Sungai Setingkai), Lubuk Agung, Sungai Rambai, Koto Bomban dan Sungai Sarik berpisah dari VIII Koto Setingkai menjadi sebuah desa muda sekaligus beralih ibu Kecamatan ke Kecamatan Kampar Kiri karena secara geografis lebih dekat dengan Lipat Kain dari pada ke XIII Koto Kampar, yang disebut dengan Desa Muda yang menjadi ibu

Kedesaan adalah Lubuk Agung yang dikenal dengan Desa IV Koto Setingkai. Adapun pimpinan Desa IV Koto Setingkai yang pertama adalah Wali Muda Bapak M. Taher. Pada tahun 1977 Desa Muda menjadi Desa Defenitif (Desa Penuh). Pada tahun 1979 dipimpin oleh Bapak Abu Bakar s/d tahun 1990, pada tahun 1991 dipimpin oleh Bapak Makmur MD BA s/d Tahun 1998. Kemudian pada tahun 1999 di pimpin Oleh Bapak Zulkarnaini.

Pada tahun 1984 sebahagian besar masyarakat Dusun III Koto Bomban, (kesatuan wilayah Dusun II Sungai Rambai) berpindah tempat tinggal dari aliran sungai Setingkai ke Pinggir jalan raya Lubuk Agung – Lipat Kain dan berganti nama menjadi Dusun III Sungai Raja Seiring dengan perkembangan aaman dan pertambahan penduduk dan untuk memudahkan dalam urusan pemerintahan maka pada tahun 2000 Dusun II Sungai Rambai dimekarkan menjadi sebuah Desa (Desa Persiapan). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 01 Tahun 2000 maka ditunjuk sebagai Pjs Kepala Desa adalah Bpk. Kudirman.

Pada tahun 2001 Desa Sungai Rambai Menjadi Desa Defenitif dan pada tahun 2004 dilakukan Pilkades, dengan calon sebanyak 3 orang, adapun yang terpilih sebagai Kepala Desa saat itu adalah Bpk. Ijon Parizal (sekarang sebagai Ketua BPD) Priode 2004-2009. Sehabis masa jabatan Kepala Desa yang Kedua tahun 2009 dilakukan Pilkades di mana saat itu terpilih Bpk. Radisman sebagai Kepala Desa Priode 2009-2016. Namun pada bulan Agustus 2014 Bpk. Radisman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa. Sehingga terjadi kekosongan Kepala Desa, September 2014 Bupati Kampar Menunjuk Bpk. Irianto. S.Ip Camat Kampar Kiri sebagai Pjs. Kepala Desa Sungai Rambai dengan masa jabatan 6 Bulan.

Seiring Perkembangan waktu desa sungai Rambai pada usia ke 15 Tahun pada tahun 2015 ini. Telah banyak mengalami Perkembangan dengan silsilah Kepemimpinan sbb:

4. Tahun: 2000 s/d 2004:
 - a. Kepala Desa : Kudirman
 - b. Sekdes : Yandripan,
 - c. Ketua BPD : Agus Salim,
 - d. Ketua LKMD: Bahtiar
 - e. Kadus: Dusun I : Hasan Sibur, Dusun II : Ngationo/M.Nurlubis, Dusun III. Azmarwan/Madi
5. Tahun : 2004 s/d 2009:
 - a. Kepala Desa : Ijaon Parizal
 - b. Sekdes : Ambril
 - c. Ketua BPD : Agus Salim digantikan Jamaran
 - d. Ketua LPM : Herman dan Bahtiar
 - e. Kadus : Dusun I : Hasan Sibur, Dusun II : M. Nurlubis Dusun III. Madi, Dusun IV. Ahmad/Jamal
6. Tahun : 2009 s/d 2015:
 - a. Kepala Desa : 2009- 2014 Radisman
 - b. Sekdes : Zani Zulkalmi
 - c. September 2014 - April 2015 Kades Irianto, S.Ip, dengan Sekdes
 - d. Zani Zulkalmi
 - e. Ketua BPD : Jamaran digantikan Ijon Parizal
 - f. Ketua LKMD: Herman
 - g. KADUS : Dusun I :Syahrul Aripin, Dusun II : Remi, Dusun III Madi, Dusun IV Jamal, Dusun V Herman

4.2. Demografi Desa Sungai Rambai

Desa Sungai Rambai dengan luas wilayah 25.000 ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Batas wilayah Desa Sungai Rambai :

- Sebelah Utara : Desa Siabu/ Kecamatan bangkinang barat
 Sebelah selatan : Desa Sungai Raja
 Sebelah Barat : Desa Sungai Sari & Lubuk Agung
 Sebelah Timur : Desa Tanjung Harapan

Topografi dengan bentang wilayah dataran rendah.

- a. Curah hujan : 1.100,00 mm
- b. Jumlah bulan hujan : 5 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 23 °C - 33 °C
- d. Tinggi tempat : + 56 m dpl.
- e. Luas wilayah Desa Sungai Rambai adalah 25 KM2 terdiri dari:
 - 1) Tanah Kebun PT : 3.000 Ha
 - 2) Tanah Kebun Masya : 12.500 Ha
 - 3) Permukiman : 122 Ha
 - 4) Tanah Hutan lindung : - Ha
 - 5) Tanah hutan Produksi : - Ha
 - 6) Tanah Hutan Konversi : - Ha
 - 7) Hutan : 9.000 Ha
 - 8) Rawa- rawa : 200 Ha
 - 9) Perkantoran : 1 Ha
 - 10) Jalan : 80 Km
 - 11) Lapangan Olahraga : 4 Ha
 - 12) Tanah lainnya : 5 Ha

4.3. Keadaan Sosial Budaya Desa Sungai Rambai

1. Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 1044 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 516 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 528 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sungai Rambai Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	516	49,43
2	Perempuan	528	50,57
	Jumlah	1044	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Sungai Rambai, Tahun 2021

Untuk dapat menggambarkan lebih lengkap informasi tentang kondisi penduduk di Desa Sungai Rambai, maka dilakukan identifikasi penduduk dengan penekanan pada klasifikasi umur dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang penduduk Desa Sungai Rambai. Untuk memperoleh informasi terkait gambaran penduduk di Desa Sungai Rambai berdasarkan umur dan jenis kelamin secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Sungai Rambai Tahun 2021

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4	18	32	50	4,79
2.	5 – 9	24	29	53	5
3.	10 – 14	23	47	70	6,7
4.	15 – 19	70	45	115	11
5.	20 – 24	80	101	181	17,34
6.	25 – 29	113	100	213	20,6
7.	30 – 34	40	42	82	7,7
8.	35 – 39	60	59	119	11,39
9.	40 – 44	42	18	60	5,75
10.	45 – 49	19	21	40	3,83
11.	50 – 54	13	12	25	2,39
12.	55 – 59	8	12	20	1,91
13.	>60	6	4	10	0,96
	Jumlah	516	528	1044	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa, Tahun 2021

Dari jumlah penduduk Desa Sungai Rambai yang dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan dari segi kesehatan ditinjau dari usia, yaitu penduduk berusia >60 tahun, paling banyak adalah 0,96%. Dari usia 0-4 tahun ada 4,79%, sedangkan 5-9 tahun ada 5%.

Dari usia > 60 tahun, jumlah penduduknya adalah 60% laki-laki dan 40% perempuan. Sedangkan pada usia 0-4 tahun, 36% adalah laki-laki dan 64% perempuan.

Jumlah penduduk usia produktif antara 20-59 tahun di Desa Sungai Rambai cukup signifikan yaitu 740 jiwa atau 70,91% dari total penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 49,43%, sedangkan perempuan 50,57 %.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah wanita usia produktif lebih banyak daripada jumlah pria. Dengan demikian, sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Sungai Rambai dapat menjadi tenaga produktif yang signifikan untuk mengembangkan usaha produktif yang diharapkan dapat semakin memperkuat perekonomian masyarakat, sementara saat ini mengandalkan tenaga produktif dari pihak laki-laki.

2. Kondisi Kesehatan

Kesehatan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan menentukan indeks pembangunan manusia (IPM) suatu desa, pada umumnya tingkat perekonomian akan menentukan tingkat atau derajat kesehatan seseorang. Dengan tingkat kesehatan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat perekonomian, bergitupun sebaliknya. Peran pemerintah dalam hal ini dituntut untuk bisa menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai serta dengan gencar melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga kesehatan.

Berikut adalah tabel kondisi kesehatan warga Desa Sungai Rambai :

Tabel 4.3. Keadaan Kesehatan Desa Sungai Rambai Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Ket
1	Rumah sakit	-	Tidak Ada
2	Puskesmas	-	Ada di Kelurahan
3	Posyandu	1 bh	
4	Bidan Desa	1 org	
5	Dokter Praktik		Tidak Ada
6	Dukun Bayi	4 org	
7	Kematian Ibu Melahirkan	-	
8	Kematian Bayi	-	
9	Kader Posyandu	12 org	
10	Penderita ISPA	20 org	
11	Sanitasi Buruk	70 RTM	
12	Rumah Kumuh	60 Rumah	
13	RT menggunakan air sumur	57 RT	Sumur Gali dan Sumur bor
14	RT menggunakan Air sungai	115 RT	Sungai Sitingkai dan Sungai Batang Kotuo

Sumber : Buku Administrasi Desa, Tahun 2021

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan meningkatkan tingkat keterampilan dan kompetensi. Tingkat kemahiran juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan berwirausaha. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan kerja baru untuk menuju zero pengangguran. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat menajamkan sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain itu mudahnya menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan keadaan prasarana pendidikan di Desa Sungai Rambai.

Tabel 4.4. Keadaan Infrastruktur Pendidikan Desa Sungai Rambai Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Ket
1	TK/PAUD	1	
2	SD	1	
3	SLTP	-	Tidak Ada
4	SLTA	-	Tidak Ada
5	PT	1	
6	MDA/TPA/PDTA	1	

Sumber : *Buku Administrasi Desa, Tahun 2021*

Sedangkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Sungai Rambai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Sungai Rambai Tahun 2021

No.		Jumlah
1	Tidak Tamat SD	460 jiwa
2	Tamat SD / sederajat	400 jiwa
3	Tamat SLTP / sederajat	90 jiwa
4	Tamat SLTA / sederajat	80 jiwa
5	Tamat D1	0 jiwa
6	Tamat D2	0 jiwa
7	Tamat D3	0 jiwa
8	Tamat S1	11 jiwa
9	Tamat S2	- jiwa
10	Tamat S3	- jiwa
11	Jumlah buta aksara	12 jiwa

Sumber : *Buku Administrasi Desa, Tahun 2021*

Berdasarkan data pada tabel 4.5 diatas diketahui sebahagian besar masyarakat Desa Sungai Rambai tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (460 jiwa). Penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 400 jiwa, sementara itu penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SLTP / sederajat berjumlah 90 jiwa, yang berpendidikan SLTA / sederajat 80 jiwa dan yang memiliki pendidikan S1 berjumlah 11 jiwa. Dari data tersebut diatas juga diketahui bahwa saat ini di Desa Sungai Rambai masih terdapat penduduk yang buta aksara yaitu sebanyak 12 jiwa.

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sungai Rambai saat ini masih rendah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Maka oleh sebab itu saat ini Desa Sungai Rambai masih tergolong sebagai salah satu desa tertinggal di wilayah provinsi Riau.

4. Agama

Ditinjau dari segi agama, masyarakat di Desa Sungai Rambai tergolong masyarakat yang hampir homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Sungai Rambai beragama Islam. Secara kultural, pegangan keagamaan ini diperoleh dari kuatnya hubungan kekerabatan atau kekerabatan di antara mereka. Selain itu, perkembangan agama berkembang berdasarkan warisan dari orang tua kepada anak dan cucu. Hal ini membuat Islam mendominasi agama di Desa Sungai Rambai.

Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh lama, bahwa selama ini pola hubungan antarmasyarakat masih banyak dipengaruhi oleh budaya ormas Islam, seperti Tarbiyah Islamiyah atau Masyumi yang mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i. dari fiqh. Meski begitu, situasi kondusif sejauh ini telah tercipta dan terpelihara meskipun ada sebagian kecil masyarakat di desa tersebut yang memeluk agama selain Islam, seperti Katolik, Kristen atau Hindu yang umumnya pendatang yang bekerja di beberapa perusahaan yang ada. . Penduduk Desa Sungai Rambai menurut agama dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Sungai Rambai Tahun 2021

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	1012	96,93
2	Katholik	0	00,00
3	Kristen	32	03,07
4	Hindu	0	00,00
5	Budha	0	00,00
	Jumlah	1044	100,00 %

Sumber : *Buku Administrasi Desa, Tahun 2021*

Berdasarkan data pada 4.6 diatas diketahui bahwa sebahagian besar penduduk di Desa Sungai Rambai beragama Islam yaitu sebanyak 1012 orang (96,93%) dan sebanyak 32 orang (03,07%) penduduk lainnya beragama Khatolik.

Sementara itu jumlah tempat ibadah di Desa Sungai Rambai akan dijelaskan pada tabel 4.7 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.7. Jumlah Tempat Ibadah Desa Sungai Rambai

No.	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla	4
3	Gereja	0
4	Wihara	0
5	Pura	0
	Jumlah	8

Sumber : *Buku Administrasi Desa, Tahun 2021*

Berdasarkan data pada tabel 4.7 diatas diketahui bahwa saat ini di Desa Sungai Rambai terdapat 1 buah masjid dan 4 buah mushala sebagai tempat ibadah masyarakat yang memeluk agama Islam. Sementara sarana ibadah untuk masyarakat yang beragama lainnya belum ada.

4.3.1. Keadaan Ekonomi Desa Sungai Rambai

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sungai Rambai dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh

tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Sungai Rambai jumlah penduduk yang mempunyai mata pencarian ada 37,03 %. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor perkebunan yakni karet dan sawit, ada 22,15 % dari total jumlah penduduk.

Jumlah terbanyak kedua adalah wirausaha lainnya dan karyawan swasta, dengan 24,00 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan.

Terbanyak ketiga adalah buruh harian lepas dengan 11,04 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 2,65 % dari total jumlah penduduk, umumnya BHL ini bekerja sebagai buruh bongkar TBS dan pupuk di perusahaan-perusahaan terdekat serta menjadi buruh bongkar muat di pasar kelurahan Lipatkain. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain.

Mengingat wilayah Desa Sungai Rambai berada di lintasan jalan raya maka sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, buruh angkut dan di sektor swasta sebagai karyawan, karena di Desa Sungai Rambai terdapat 3 perusahaan sawit yakni PT.Ganda Buanindo (PT.GBI), PT.Kebun Pantai Raja (PT.KPR) dan PT.Mustika Agro Sari (PT.MAS), juga terdapat perusahaan perkebunan lainnya seperti PT.PSPI dan PT.RAPP. Ketiga perusahaan (PT.GBI, PT.KPR, PT.MAS)

memiliki pabrik pengolahan sawit (CPO) yang terdapat di wilayah hukum Sungai Rambai yang bisa menampung tenaga kerja lokal non skil.

Kegiatan masyarakat usaha di Desa Sungai Rambai adalah sebagai peternak kerbau, nelayan sungai, pedagang, baik yang membuka usaha di Desa Sungai Rambai maupun di Desa Foldkain. Tingkat pendapatan masyarakat belum sepenuhnya mencukupi untuk kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh dan masih kurangnya penyediaan pendidikan, upah pegawai swasta dianggap cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. kebutuhan sehari-hari.

Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Desa Sungai Rambai Tahun 2021

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk yang bekerja
1	Petani/pekebun	298	50,66 %
2	Buruh tani	119	20,23 %
3	PNS/TNI/POLRI	0	0 %
4	Honoror Pemerintah	19	3,23 %
5	Karyawan swasta	0	0 %
6	Pedagang	20	3,37 %
7	Wirausaha lainnya	0	0 %
8	Pensiunan	1	0,17 %
9	Tukang bangunan	18	3,04 %
10	Peternak	0	0 %
11	Montir	2	00,33 %
12	Buruh Harian Lepas	155	26,18 %
13	Lain-lain/tidak tetap	0	0 %
	Jumlah	592	100,00 %

Sumber : Buku Administrasi Desa, Tahun 2021

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Sungai Rambai memiliki alternatif pekerjaan selain sektor pekebun karet dan sawit. Setidaknya karena tipologi desa yang berdampingan dengan Kelurahan Lipatkain yang banyak memainkan peran dalam bidang perdagangan dan jasa.

4.3.2. Kondisi Pemerintahan Desa Sungai Rambai

1. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1
2. Sekretaris Desa : 1
3. Perangkat Desa : 6
4. BPD : 7 orang

2. Lembaga kemasyarakatan

1. LPM : 1 Kelompok
2. PKK : 1 Kelompok
3. Posyandu : 1 Kelompok
4. Pengajian : 4 Kelompok
5. Arisan : 5 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 2 Kelompok
7. Kelompok Tani : 4 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Pemuda desa : 1 Kelompok
10. Remaja Masjid : 1 Kelompok

3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

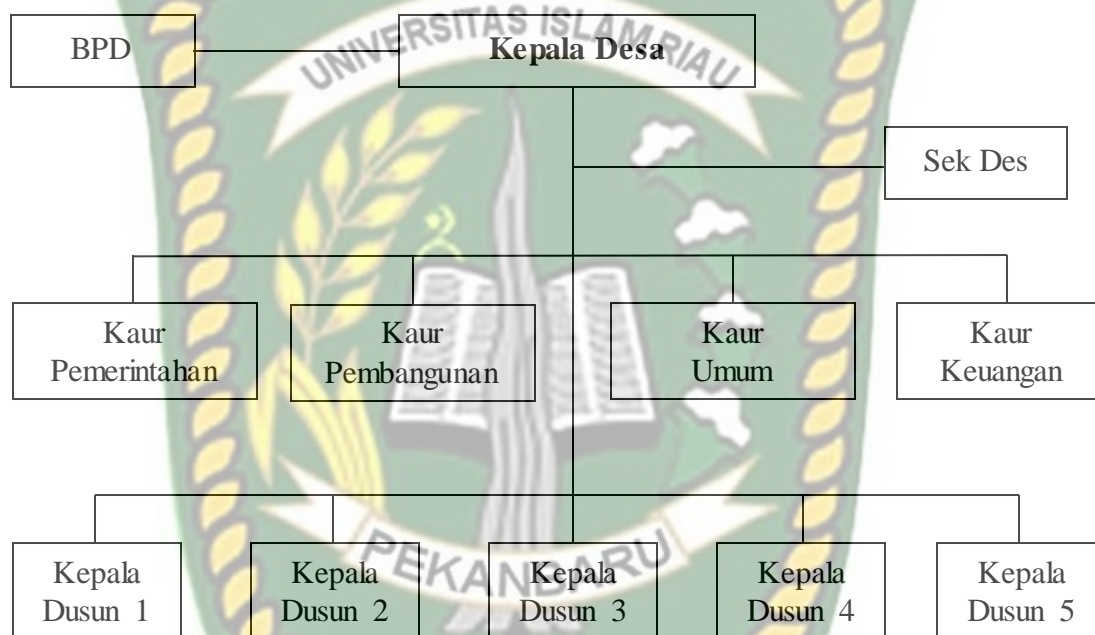
1. Dusun 1 Koto Koto Bukit : Jumlah 4 RT 2 RW
2. Dusun 2 Kampung Baru : Jumlah 4 RT 2 RW
3. Dusun 3 Koto Betung : Jumlah 4 RT 2 RW
4. Dusun 4 Koto Baramban : Jumlah 4 RT 2 RW

5. Dusun 5 Koto Bomban : Jumlah 4 RT 2 RW

4.4. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Sungai Rambai

4.4.1. Struktur Organisasi

Gambar 4.1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar



Sumber : Buku Administrasi Desa, Tahun 2021

4.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Desa

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, administrasi dan kearsipan, mengelola inventarisasi kekayaan desa, serta menyiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi:
 - Sebuah. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian prosedur kearsipan
 - a. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - b. Pelaksanaan manajemen administrasi umum
 - c. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - d. manajemen administrasi desa
 - e. Penyiapan bahan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kaur Pemerintahan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengurusan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penataan, Kebijakan Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
 - a. Sebuah. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - b. Penyiapan bahan penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala desa
 - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Desa
 - e. Penyiapan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
 - f. Penyiapan bantuan dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dan pertahanan sipil; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa:

- a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

- c. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang kurang mampu secara ekonomi agar mendapatkan skorsing. Misalnya, penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak dipungut biaya, gratis bagi warga Desa yang membutuhkan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Serbaguna, kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
- d. Sertifikat Lalu Lintas
- e. Sertifikat NTCR
- f. Surat Pengantar Pernikahan
- g. Sertifikat haji
- h. Surat keterangan Domisili
- i. saya. Sertifikat Pengenalan Polisi
- j. Sertifikat Transfer
- k. Akte Kelahiran/Kematian
- l. Sertifikat ke Bank dll.
- m. Sertifikat Pengiriman Wesel
- n. Sertifikat Jual Beli Hewan
- o. Sertifikat Izin Kerumunan
- p. Pengenaan retribusi atas jual beli hasil tanah dibebankan dari harga jual beli dan dibebankan kepada pembeli atau penjual.
- q. Pengenaan retribusi atas transaksi jual beli tanah rumah dibebankan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
- r. Sertifikat Pemotongan Kayu/Bambu
- s. Tarif pengenaan retribusi kepada penyelenggara angkutan sewa dan BUMdes; dan
- t. Perusahaan PT/CV atau kontraktor dan sejenisnya dari total anggaran.

Kaur Pembangunan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi desa, pengelolaan penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta penyusunan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan tugas.
2. Fungsi:
 - a. Sebuah. Penyiapan bantuan analisis & kajian pengembangan ekonomi masyarakat
 - b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - c. Pengelolaan tugas tugas pembantuan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kaur Umum

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
 - f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kaur Keuangan

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Dusun

1. Tugas
 - a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerjanya
 - b. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kerjasama masyarakat
 - c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - d. Membantu kepala desa dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Daerah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
 - e. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
2. Fungsi
 - a. Mengkoordinasikan jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan masyarakat di wilayah dusun
 - b. Melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya
 - c. Berbisnis dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan swadaya serta melaksanakan pembangunan ekonomi

- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- e. Melaksanakan fungsi lain yang didelegasikan oleh kepala desa.

BPD (Badan Perwakilan Desa)

1. BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Tugas
 - a. Mendiskusikan rancangan peraturan desa dengan kepala desa
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - c. Mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan kepala desa
 - d. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - f. Mengembangkan aturan BPD.
3. Hak
 - a. Meminta informasi kepada pemerintah desa
 - b. Mengungkapkan pendapat Kewajiban
 - c. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
 - d. Menerapkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. Memelihara dan memelihara hukum nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
 - g. Memproses pemilihan kepala desa
 - h. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, golongan dan golongan
 - i. Menghargai nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
 - j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Nama-nama aparat Desa Sungai Rambai :

Kepala desa	: MADI
Sekretaris Desa	: ZANI ZUKALMI
Kepala Urusan Pemerintahan	: JULI ANDRIO
Kepala Urusan Umum	: WIDODO SAPUTRA
Kepala Urusan Pembangunan	: ABU HURAIRO
Kepala Urusan Keuangan	: MASRIANTO

Kepala Urusan Keuangan	: ABU HURAIROH
Kepala Dusun	:
Dusun 1	: M. TOHA
Dusun 2	: ANGGI SUPRATMAN
Dusun 3	: AMBRIL
Dusun 4	: HENDRIZAL
Dusun 5	: HERMAN

**Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Ketua : IJON PARIZAL
- Wakil Ketua : MASRIANTO
- Sekretaris : SALENDRA
- Anggota : YANRIPAN
- Anggota : SULTI SAFITRI
- Anggota : AMBRIL
- Anggota : SIRU JIMAN



BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Sesuai dengan apa yang diuraikan dalam metode penelitian ini, yang menjadi objek penelitian ini adalah Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar, Pembantu Desa yang bertugas di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Aparatur Pemerintah Desa Sungai Rambai, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dengan jumlah 26 orang.

Namun dari keseluruhan sampel tersebut, untuk Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar, Pendamping Desa tidak diberikan quisioner dan hanya dilakukan wawancara mendalam jumlah sampel penelitian yang diberikan quisioner penelitian hanya Pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, aparatur Pemerintahan Desa Sungai Rambai, Tokoh Masyarakat beserta masyarakat Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan jumlah 25 orang.

Untuk menjelaskan karakteristik dari keseluruhan sampel penelitian yang diberikan quisioner penelitian, oleh sebab itu peneliti terlebih dahulu menyajikan data mengenai identitas responden penelitian yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan responden.

Untuk mengetahui kondisi responden/sampel yang dijadikan penelitian, maka gambaran singkat mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

1). Jenis Kelamin Responden

Tabel 5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	23	88,46
2	Perempuan	3	11,54
Jumlah		26	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel dan diagram 5.1 diatas dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang atau 88,46%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang atau 11,54%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden penelitian Analisis Kinerja Pendamping Desa Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan..

2). Umur Responden

Tabel 5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30 tahun	1	3,85
2	31-40 tahun	3	11,54
3	41-50 tahun	13	50,00
4	> 50 Tahun	9	34,62
Jumlah		26	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Dari tabel dan diagram 5.2 di atas terlihat bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 1 orang atau 3,85% dari total jumlah responden. Responden berusia

31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 11,54% dari total jumlah responden. Responden berusia 41-50 tahun sebanyak 13 orang atau 50,00% dari total jumlah responden. Responden berusia >50 tahun sebanyak 9 orang atau 34,2% dari total jumlah responden. Sehingga dari data tersebut diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan umur terbanyak adalah responden yang berusia 41-50 tahun.

3). **Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan responden penelitian terdiri dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden penelitian dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2/S3	3	11,54
2	S1	8	30,77
3	Diploma	0	0,00
4	SLTA	10	38,46
5	SLTP	3	11,54
6	SD	2	7,69
Jumlah		26	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana – 2 (S2) dan Sarjana – 3 (S3) sebanyak 3 orang atau 11,54%, responden dengan tingkat pendidikan Sarjana 1 (S1) sebanyak 8 orang atau 30,77 %, responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 0 orang atau 0,00% dari total responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 10 orang atau 38,46% dari total responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 3 orang atau 11,54% dari seluruh responden,

responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang atau 7,69% dari seluruh responden.

Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar lebih banyak memiliki tingkat Pendidikan SLTA.

5.2. Analisa Data Hasil Penelitian

Adanya pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah, merupakan wujud implementasi peraturan per-Undang-Undangan No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diberlakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun tugas yang diberikan pemerintah kepada pendamping desa yaitu berupa melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri.

Pendamping desa sesuai dengan tugasnya mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya melakukan pembangunan di desa guna menciptakan kehidupan bernegara yang adil dan makmur dengan terjaminnya kesejahteraan rakyat dalam bentuk masyarakat desa yang mandiri.

Pemberdayaan ditujukan untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya

pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri. Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumberdaya yang dimiliki. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri guna menciptakan masyarakat Desa yang mandiri, masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memecahkan masalah masalah dilingkungan Desanya, mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta menciptakan kesejahteraannya sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan atau daya dari masyarakat itu sendiri agar mampu hidup dan bertahan dalam segala kondisi.

Untuk memberikan gambaran tentang Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, pada bagian ini akan memberikan gambaran masing-masing variabel berdasarkan tanggapan responden terhadap item kuesioner penelitian.

Adapun yang dijadikan sebagai kajian analisis penelitian ini adalah mengenai Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang analisis berdasarkan pendekatan Kinerja (*performance*) dengan indikator dan sub indikator sebagai berikut:

1. Prestasi kerja (*prestasi*), yaitu hasil kerja individu dalam melaksanakan tugasnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas kerja:
 - a. Ketelitian, kerapian Pendamping Lokal Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Pemahaman Fasilitator Lokal Desa tentang tugas dan prosedur kerja, penggunaan alat kerja dan kemampuan teknis dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
 - c. Kesiapan pendamping desa setempat dalam melaksanakan tugas di luar pekerjaan, penugasan baru, kecepatan berpikir dan bertindak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. Sikap Pendamping Lokal Desa kepada pimpinan dalam menerima perubahan kerja
2. Keahlian (*skill*), yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dianalisis berdasarkan sub indikator sebagai berikut:
 - a. Penerapan pengetahuan atau keahlian khusus pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. Bekerja sama, memahami, dan memotivasi masyarakat, baik secara individual maupun dalam kelompok;
 - c. Menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi yang rumit
3. Perilaku (*attitude*), yaitu sikap dan perilaku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, yang dianalisis berdasarkan sub-indikator berikut:
- a. Hubungan sosial Pendamping Lokal Desa dengan tim kerja maupun masyarakat Desa;
 - b. Kejujuran Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Kemauan Pendamping Lokal Desa dalam mensukseskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Rasa percaya diri dan inisiatif yang dimiliki Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas.
4. Kepemimpinan (*Leadership*), ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas, dianalisis berdasarkan sub indikator sebagai berikut:
- a. Melakukan inovasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Meyampaikan program-program pemberdayaan masyarakat serta memahami berbagai permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa;

- c. Kemampuan Pendamping Lokal Desa memotivasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan Desa;
- d. Mengawasi dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Dalam mengambil keputusan tentang interpretasi mean deskriptif dari masing-masing sub-variabel yang diteliti, penulis menggunakan pedoman dari Ghozali (2006) sebagai berikut:

Tabel. 5.4. Penilaian Interpretasi Mean Variabel Penelitian

No	Nilai Mean	Interpretasi
1	1 – 1,79	Sangat Tidak Baik
2	1,80 – 2,59	Tidak Baik
3	2,60 – 3,39	Cukup Baik
5	3,40 – 4,19	Baik
6	4,20 – 5,00	Sangat Baik

Sumber : Ghozali 2007

Hasil tanggapan responden yang berjumlah 25 orang (sampel yang diberikan kuisioner), berdasarkan hasil kuisioner penelitian akan dijabarkan dalam bentuk tabel tabulasi frekuensi dengan skor masing-masing indikator variabel dan sub indikator variabel sebagai berikut:

5.2.1. Prestasi kerja (*Achievement*).

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dilihat dari karakteristik pribadinya dan persepsi tentang perannya dalam pekerjaan itu, atau suatu bentuk penilaian tersendiri dalam melaksanakan dan meningkatkan program kerjanya.

Penilaian kinerja sangat penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Penilaian kinerja merupakan umpan balik bagi pegawai itu sendiri, karena untuk mencapai tujuan sistem penilaian berkaitan dengan pekerjaan pegawai.

Pendampingan desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat menciptakan pembangunan partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia desa dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan desa.

Berdasarkan maksud dan tujuan dilaksanakannya program Pendampingan Desa tersebut, maka salah satu faktor yang turut berperan mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa khususnya yang saat ini bertugas di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yaitu prestasi kerja (*achievement*), sangat perlu untuk dilakukan analisis agar mendalam agar seluruh program pembangunan masyarakat perdesaan yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat dapat terselenggara dengan baik

Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan indikator Prestasi kerja (*Achievement*) dianalisis berdasarkan sub indikator antara lain sebagai berikut:

- a. Kualitas kerja Pendamping Lokal Desa meliputi : ketelitian, kerapian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Pengetahuan Pendamping Lokal Desa terhadap tugas dan prosedur kerja, penggunaan alat kerja maupun kemampuan teknis dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas diluar pekerjaan, adanya tugas baru, kecepatan berpikir dan bertindak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Sikap Pendamping Lokal Desa kepada pimpinan dalam menerima perubahan kerja

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai indikator Prestasi kerja (*Achievement*), akan dijelaskan pada tabel 5.5 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.5. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Prestasi kerja (*Achievement*)

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Kualitas kerja Pendamping Lokal Desa	Frekwensi	0	13	12	0	0	25	3,52
		Skor	0	52	36	0	0	88	Baik
2	Pengetahuan terhadap tugas dan prosedur kerja	Frekwensi	5	14	6	0	0	25	3,96
		Skor	25	56	18	0	0	99	Baik
3	Kemampuan pelaksanaan tugas diluar pekerjaan	Frekwensi	0	9	16	0	0	25	3,36
		Skor	0	36	48	0	0	84	Cukup Baik
4	Sikap kepada pimpinan	Frekwensi	4	19	2	0	0	25	4,08
		Skor	20	76	6	0	0	102	Baik
Rata-Rata Penilaian Indikator Prestasi kerja (<i>Achievement</i>)								3,73	Baik

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. Baik : 3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.5 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Prestasi kerja (*Achievement*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dengan nilai rata-rata sebesar 3,73 berada pada katagori Baik. Skor tertinggi yang diperoleh sebesar 3,96 yaitu mengenai Pengetahuan Pendamping Lokal Desa terhadap tugas dan prosedur kerja, penggunaan alat kerja maupun kemampuan teknis

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan skor terendah sebesar 3,36 yaitu mengenai Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas diluar pekerjaan, adanya tugas baru, kecepatan berpikir dan bertindak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan data pada tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa Prestasi kerja (*Achievement*) Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata berada pada kategori **Baik**.

Secara tegas tugas pendamping desa telah diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang aturan pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disertai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Dalam hal ini Pendamping Desa ditunjuk untuk mendampingi Desa dalam pembangunan dan melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat berupa tanggung jawab dalam bentuk tugas yang harus dilaksanakan yaitu :

Dalam upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka seorang Pendamping Lokal Desa memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari

tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparat Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan,

memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

- d. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.
- e. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.
- f. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desayang baru.Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalu pelatihan, seminar, dan lain-lain.

Berdasarkan tanggungjawab tugas pemberdayaan tersebut, maka dapat diketahui prestasi kerja dari seorang Pendamping Lokal Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Untuk itu, berdasarkan tanggapan dari masing masing informan penelitian mengenai Prestasi kerja (*Achievement*) Pendamping Lokal Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampa berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Rambai sebagai berikut:

“Menurut saya dari segi prestasi kerja Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tuntasnya semua kegiatan pemberdayaan desa dibawah pengelolaan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa saat ini. Begitu juga dengan dilaksanakannya program pendampingan Desa di desa kami saat ini, maka perhatian Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada masyarakat yang ada di desa ini sudah mulai ada dan mulai harmonis. Ini semua tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak dan juga dukungan yang diberikan oleh Pendamping Lokal Desa yang ada di desa kami.”

Tanggapan mengenai prestasi kerja Pendamping Lokal Desa ini, juga ditanggapi langsung oleh Pendamping Lokal Desa Teluk Paman sebagai berikut:

“Menurut saya persetasi Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan tugas melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa selama ini sudah baik. Berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sama-sama kami lakukan di desa masing-masing sudah berjalan dengan baik, Namun yang menjadi kendala bagi kami semua termasuk juga bagi Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan tugas adalah jumlah desa yang menjadi tanggungjawab dari masing-masing Pendamping Lokal Desa melebihi beban tugas dari Pendamping Lolak Desa itu sendiri. Dimana saat ini masing-masing Pendamping Lokal Desa rata-rata mendapat tugas mendampingi tiga Desa sekaligus. Apalagi jarak Desa di Kecamatan Kampar Kiri ini sangat jauh dari ibukota Kabupaten dan juga Ibu Kota Provinsi Riau lumayan jauh bisa memakan waktu 3 jam dalam kondisi normal atau bahkan lebih jika situasi atau cuaca kurang baik seperti hujan. Agar masing-masing Pendamping Lokal Desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka hendaknya berbagai tugas yang diberikan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing petugas dan juga kondisi geografis daerah tempat kami bertugas. Jangan memberikan penugasan secara mendadak dan juga untuk daerah sulit atau terisolir seperti di Desa Sungai Rambai ini, kami diberikan fasilitas kendaraan dinas. Agar mudah melakukan koordinasi baik ke pusat Kabupaten dan juga Ke Pekanbaru sebagai pusat ibukota Provinsi. Yang paling penting adalah masalah kemampuan. Hendaknya satu desa ditugaskan satu petugas saja. Jangan seperti saat ini, satu desa

mendampingi tiga atau lebih desa lainnya. Sementara jarak antar Desa lumayan jauh.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui upaya pendampingan. Pendampingan merupakan langkah penting yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dicapai melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menyediakan Pembantu Desa (PLD) yang berkedudukan di desa. Adapun yang menjadi tugas pokok bagi seorang Pendamping Lokal Desa sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa skala lokal Desa;
2. Terlibat aktif dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan sehari-hari di Desa terkait pelaksanaan SDGs Desa, kerjasama antar desa, dan BUM Desa ke dalam penerapan laporan harian di SID;
3. Melakukan self assessment melalui penerapan laporan harian di SID; dan
4. Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri dan melalui komunitas belajar.

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar mengenai sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil laporan Tenaga pendamping Desa Kecamatan Kampar Kiri yang saya terima, diketahui bahwa Pendamping Lokal Desa khususnya yang bertugas di Desa Sungai Rambai dari segi prestasi kerja sudah cukup baik. Berbagai program pemberdayaan dari kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi yang ditugaskan, sudah mampu dilaksanakan

dengan baik. Walau masih ada beberapa kendala ataupun permasalahan teknis di lapangan yang terjadi namun hal tersebut masih bisa kita tanggulangi bersama dan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya nanti. .”

Tanggapan mengenai prestasi kerja Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai berikutnya disampaikan oleh Pendamping Teknik Infrastruktur Kecamatan Kampar Kiri sebagai berikut:

“Mengenai prestasi kerja prestasi kerja Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai menurut saya sudah baik. Selain dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan baik, juga selalu update terhadap semua hal yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kami sering berkonsultasi mengenai berbagai masalah yang kami hadapi selama menjadi tenaga pendamping desa. Selain masih sangat muda, beliau juga ramah. Bahi pada kami sesama pendamping dan juga masyarakat desa..”

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian terkait dengan Prestasi kerja (*Achievement*) Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar diketahui bahwa Prestasi Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah menunjukkan prestasi yang baik. Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, selalu update dengan berbagai informasi dan data tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta ramah dengan sesama tenaga pendamping dan juga masyarakat Desa lainnya.

Sementara itu, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai tahun 2020 berdasarkan data laporan kegiatan Pendampingan yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Sungai Rambai akan dijelaskan dalam tabel 5.6 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.6. Data Kegiatan Pemberdayaan Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai Tahun 2020

No	Kegiatan Pemberdayaan	Keterangan
1	Pembinaan aparatur pemerintahan Desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer).	Terlaksana
2	Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan.	Terlaksana
3	Bersama-sama dengan kepala Desa berbaur dan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok nelayan dan kelompok tani untuk menggalakkan pembangunan Desa, meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa	Terlaksana
4	Bersama dengan masyarakat dan ibu-bu PKK Desa Sungai Rambai melakukan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pembuatan alat pengering ikan dengan menggunakan sinar matahari)	Terlaksana
5	Melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi penerima BLT.	Terlaksana
4	Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan pemuda	Terlaksana

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Rambai Tahun 2021

Adapun temuan penelitian yang terkait dengan indikator Prestasi kerja (*Achievement*) Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa permasalahan yang menjadi kendala tertentu bagi seorang Pendamping Lokal Desa yang bertugas adalah minimnya sumberdaya Pendamping Lokal Desa yang saat ini bertugas.

Secara kuantitas, pendamping desa untuk Kabupaten Kampar belum ideal. Konsep ideal pelayanan desa adalah satu desa, satu desa pendamping. Namun, di Kabupaten Kampar, satu fasilitator desa bisa membantu 3-4 desa. Keterbatasan kemampuan fisik pendamping desa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan.

Tugas utama fasilitator desa setempat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah memastikan kemajuan kegiatan pembangunan desa. Jika ada empat desa, maka satu desa pembantu melaksanakan tugas mengendalikan empat desa dengan permasalahan yang berbeda untuk setiap desa. Beban kerja yang ada tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada, sehingga pekerjaan pendamping desa setempat tidak bisa fokus melaksanakan tugas pendampingan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, kerja pendampingan desa tidak hanya sebatas menjamin kemajuan kegiatan pembangunan desa, tetapi ada kerja pemberdayaan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk satu orang Pendamping Lokal Desa khususnya di wilayah Kecamatan se Kabupaten Kampar bertugas mendampingi lebih dari satu desa binaan. Seperti saat penelitian dilakukan diketahui bahwa jumlah Tenaga Pendamping di wilayah Kabupaten Kampar berjumlah 67 orang, tenaga ahli sebanyak 6 orang, pendamping pemberdayaan untuk Kecamatan berjumlah 32 orang dan teknik infrastruktur sebanyak 19 orang. Adapun data mengenai Tenaga Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kampar Kiri tahun 2021 akan dijelaskan pada tabel 5.7 dibawa sebagai berikut:

Tabel 5.7. Nama Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Nama Pendamping Lokal Desa	Nama Desa
1	Sandri Jalil Pranata	Sei. Rambai Sei. Raja Muara Selaya
2	Azri Amin	Teluk Paman Teluk Paman Timur Sei. Sarik Sei. Harapan

3	Sukron	Sei. Geringging Sei. Paku Lipatkain Selatan Lipatkain Utara
4	Boy Sandi	Tanjung Mas Tanjung Harapan IV Koto Setingkai Padang Sawah
5	Hermiyatmi	Kuntu Kuntu Darussalam Sei. Liti Domo

Sumber : Kantor Camat Kampar Kiri Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 5.7 diatas diketahui bahwa Pendamping Desa di Kecamatan Kampar Kiri ada Delapan Pendamping Desa, 2 (dua) Pendamping Desa Pemberdayaan yang berkedudukan di Kecamatan, 1 (satu) Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur yang berkedudukan di Kecamatan dan 5 Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan di Desa. di Kecamatan Kampar Kiri terdapat 19 (sembilan belas) desa dan 1 Pendamping Lokal Desa mendampingi 3-4 desa. Dengan ketersediaan jumlah Pendamping Lokal Desa yang tidak memadai ini, tentunya akan mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas pendampingan khususnya di Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

5.2.2. Keahlian (*skill*).

Keahlian (*skill*), adalah kemampuan menggunakan akal, pikiran, dan gagasan dan kreativitas dalam melakukan, mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan nilai dari hasil pekerjaan. Menurut Suprpto (2009:135) mendefinisikan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam dalam praktek sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan.

Program pendampingan dan pemberdayaan desa yang dilakukan oleh Fasilitator Desa erat kaitannya dengan kegiatan yang dibiayai oleh instansi pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kegiatan yang dilakukan merupakan program rutin instansi terkait.

Sasaran kerja pendampingan desa setempat dibebankan kepada pendamping desa setempat P3MD untuk menjamin terselenggaranya program dana desa mulai dari tahap perencanaan pembangunan desa sampai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Secara rinci target kerja pendampingan desa setempat adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Desa
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa
 - 1) Pembentukan Tim RPJM Desa
 - 2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan Pembangunan dengan arah pembangunan Kabupaten
 - 3) Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 - 4) Laporan Hasil PKD kepada Kepala Desa
 - 5) Penyampaian hasil PKD oleh Kades ke BPD
 - 6) Musdes Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
 - 7) Penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh Tim RPJM Desa
 - 8) Musrenbang desa Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJM Desa
 - 9) Perbaiki RPJM Desa berdasarkan kesepakatan musrenbang desa
 - 10) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
 - 11) Rapat Keputusan Bersama Kades dan BPD untuk penetapan Perdes RPJM Desa
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
 - 1) Musdes Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
 - 2) Pembentukan Tim Verifikasi sesuai Jenis Kegiatan dan keahlian
 - 3) Pembentukan Tim RKP Desa
 - 4) Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program
 - 5) Pencermatan Ulang RPJM Desa
 - 6) Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - 7) Penyusunan Usulan Pelaksana Kegiatan
 - 8) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
 - 9) Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi
 - 10) Laporan Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa
 - 11) Musyawarah Perencanaan untuk penetapan RKP Desa

- 12) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
 - 13) Rapat Keputusan Bersama Kades dan BPD untuk penetapan Perdes RKP Desa
 - 14) Penyampaian Daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
- a. Tahap persiapan
 - 1) Penetapan Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kades
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kades
 - 3) Sosialisasi Kegiatan
 - 4) Pembekalan pelaksana Kegiatan meliputi: Pengelolaan Keuangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
 - 5) Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
 - 6) Pendataan dan Pengadaan Tenaga Kerja
 - 7) Pendataan Kebutuhan Material dan Cara Pengadaan Material.
 - b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Pencairan dana Tahap I dan Pelaksanaan Kegiatan
 - 2) Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Tahap Pertama
 - 3) Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan Tahap I
 - 4) Pencairan dana Tahap II dan Pelaksanaan Kegiatan
 - 5) Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Tahap Kedua
 - 6) Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan Tahap II
 - 7) Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Tahap Ketiga
 - 8) Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan Tahap III
 - 9) Penyampaian Laporan Pelaksana Kegiatan kepada Kades
 - 10) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemdes oleh Kades
 - 11) Musdes Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 12) Perdes tentang Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
 - 13) Pembentukan kelompok pelestarian dan pemanfaat hasil kegiatan
 - 14) Peningkatan Kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaat

Kegiatan rutin yang dilakukan pendamping desa setempat adalah: mengunjungi kantor desa untuk memantau penggunaan dana desa. Untuk program yang telah dianggarkan melalui dana desa. Dimulai dari tahap perencanaan kegiatan berjenjang dimulai dari musyawarah masyarakat desa. Setelah program masuk dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP), tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan baik pembangunan maupun infrastruktur dan pelatihan. Peran pendampingan desa setempat adalah tentang apa yang bisa dan tidak bisa dibiayai dengan dana desa, sedangkan output kegiatan belum menjadi prioritas. Tahap selanjutnya adalah

evaluasi kegiatan, yang lebih menitikberatkan pada bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan setiap program dibiayai oleh dana desa. Pendampingan desa setempat lebih difokuskan pada penatausahaan laporan keuangan. Perhatian pendamping desa terhadap keberlanjutan program/kegiatan, pencapaian target kegiatan, dan manfaat yang diperoleh masyarakat belum mendapat proporsi yang seharusnya dalam program pembangunan dan pemberdayaan desa/masyarakat.

Menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 24 menyebutkan bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa.
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa.
- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Agar kinerja Pendamping Lokal Desa dapat berjalan dengan baik dan efektif sangat didukung oleh keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang Pendamping Lokal Desa. Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan indikator keahlian (*skill*) dianalisis berdasarkan sub indikator antara lain sebagai berikut:

- a. Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Kemampuan Pendamping Lokal Desa untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi masyarakat, baik secara individual maupun dalam kelompok;

- c. Kemampuan Pendamping Lokal Desa untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi yang rumit

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai indikator keahlian (*skill*), akan dijelaskan pada tabel 5.8 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.8. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Keahlian (*Skill*)

No	Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata	
		SB	B	CB	KB	TB			
1	Kemampuan menerapkan keahlian khusus	Frekwensi	5	17	3	0	0	25	4,08 Baik
		Skor	25	68	9	0	0	102	
2	Kemampuan bekerjasama dan memotivasi masyarakat	Frekwensi	4	14	7	0	0	25	3,88 Baik
		Skor	20	56	21	0	0	97	
3	Kemampuan analisis	Frekwensi	0	10	15	0	0	25	3,40 Cukup Baik
		Skor	0	40	45	0	0	85	
Rata-Rata Penilaian Indikator Keahlian (<i>Skill</i>)								3,79 Baik	

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. **Baik : 3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.8 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Keahlian (*Skill*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dengan nilai rata-rata sebesar 3,79 berada pada katagori Baik. Skor tertinggi yang diperoleh sebesar 4,08 yaitu mengenai kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus pemberdayaan masyarakat Desa dan skor terendah sebesar 3,40 yaitu mengenai kemampuan Pendamping Lokal Desa untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi yang rumit.

Berdasarkan data pada tabel 5.8 diatas dapat diketahui bahwa Keahlian (*Skill*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata berada pada kategori **Baik**.

Tanggapan dari masing masing informan penelitian mengenai Keahlian (*Skill*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kampar Kiri sebagai berikut:

“Untuk keahlian Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai menurut saya sudah Baik. Saya perhatikan selama ini Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah mampu menerapkan teknik-teknik pemberdayaan masyarakat desa yang diperoleh selama mengikuti pelatihan Pendamping Desa. Disamping itu Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai juga memiliki inovasi-inovasi tersendiri yang dia terapkan selama bertugas di Desa Sungai Rambai.”

Tanggapan mengenai Keahlian (*Skill*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai, ditanggapi oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Sungai Rambai sebagai berikut:

“Saya rasa beliau (Pendamping Lokal Desa) sudah cukup ahli dalam melaksanakan tugas. Beliau juga memiliki ide-ide bagus untuk kemajuan Desa. Namun mungkin karena keterbatasan waktu dan juga pendanaan, maka beberapa ide tersebut belum sempat kita lakukan di desa ini. Cukup baguslah menurut saya.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Pendamping Lokal Desa Teluk Paman mengenai keahlian dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

“Keahlian Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas rutin sudah baik. Namun permasalahan yang kami semua saat ini hadpi termasuk juga bagi Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai adalah mengenai tugas instruksi-instruksi tertentu yang sifatnya insidental atau mendadak. Baik yang datang dari Kementrian Desa ataupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, atau bahkan yang lebih sering itu adalah tugas mendadak yang datangnya dari masyarakat Desa itu sendiri. Hal ini disebabkan karena program kegiatan yang kami lakukan sangat padat. Disamping itu untuk jenis penugasan yang sifatnya mendadak tersebut,

tentunya diperlukan kemampuan untuk menganalisa masalah agar apa yang kita lakukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Seperti halnya adanya perubahan format Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan juga perubahan format Laporan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa kepada Kepala Desa kepada Kepala Desa dan perubahan-perubahan serta tugas-tugas lainnya diluar tugas rutin yang harus dilakukan. Seharusnya pemerintah memberikan pembekalan terlebih dahulu kepada masing-masing petugas pendamping desa agar apa yang akan lakukan dapat terlaksana dengan baik.”

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian terkait dengan keahlian (*skill*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar diketahui bahwa keahlian (*skill*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah baik. Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan telah memiliki inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Rambai.

Adapun temuan penelitian yang terkait dengan indikator keahlian (*skill*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian adalah adanya penugasan-penugasan diluar tugas rutin pendamping lokal desa yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kepada pendamping lokal desa tanpa dibekali dengan kegiatan pelatihan sebelum diberikannya tugas tersebut.

Temuan lainnya terkait dengan keahlian (*skill*) pendamping lokal desa yaitu seringkali terjadi perubahan-perubahan nomenklatur administrasi pelaporan kegiatan karena perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan perundangan tentang tata naskah laporan kinerja pendamping lokal desa. Dengan adanya penugasan-

penugasan yang sifatnya insidental tersebut dan juga dengan seringnya perubahan dan tata administrasi pelaporan kegiatan, maka secara langsung akan mempengaruhi kinerja seorang pendamping lokal desa dalam melaksanakan tugas.

5.2.3. Perilaku (*Attitude*).

Memangku jabatan menjadi Pendamping Desa pada dasarnya, diharuskan untuk tunduk dan patuh pada tata perilaku dan etika profesi pendamping profesional. Hal tersebut berdasar pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kementerian Desa, sesuai dengan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bagi Desa Pendamping. Selanjutnya sebagai pendamping desa juga ada etika yang harus dilakukan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, atau setidaknya agar masyarakat dapat percaya dan mau membantu fasilitator dalam memfasilitasi desa yang sedang dilaksanakan atau sebaliknya.

Setidaknya ada beberapa etika pendamping, agar pendamping yang bersangkutan bisa dekat, diterima, dan dicintai masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memaksakan kehendak: Peran pendamping adalah sebagai fasilitator. Fasilitator terkadang diperbolehkan untuk memberikan masukan atau saran sebagai nara sumber, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan pendapatnya dan memaksakan pendapatnya.
2. Tidak mengambil keputusan yang seharusnya dimiliki masyarakat: Dalam hampir semua situasi, masyarakat berhak untuk memutuskan. Pembantu hanya memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya sendiri atau program administrasi yang menjadi kewenangannya.
3. Tidak manipulatif: Seorang mentor yang fasih berbicara dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu akan mudah menjadi manipulator. Jika hal-hal ini diketahui publik, hubungan akan segera rusak. Teman tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak mereka atau membuat keputusan – bahkan jika orang tidak tahu!

4. Konsisten dalam memberikan masukan dan informasi: Pengawas yang tidak konsisten akan membingungkan publik, terutama jika mereka memberikan versi yang berbeda di tempat lain, sehingga menimbulkan konflik masyarakat. Kehidupan seorang pendamping akan jauh lebih sederhana jika konsisten.
5. Membantu masyarakat untuk berpikir logis, melihat asumsi: Satu hal yang membantu masyarakat dalam jangka panjang adalah meningkatkan daya pikir mereka, karena fasilitator selalu mengajak mereka untuk berpikir dan mendorong mereka untuk meninjau kembali asumsi yang mereka pegang, karena beberapa asumsi tidak benar. Dengan kebiasaan ini, orang akan jauh lebih mandiri.
6. Membantu orang melihat dari perspektif lain, menambahkan alternatif: Kedua kebiasaan ini juga membantu orang berpikir sendiri. Orang diajak untuk melihat suatu situasi dari sudut pandang orang lain, karena dengan perspektif itu banyak asumsi yang bisa dipertanyakan. Kemudian jika mereka terbiasa dengan alternatif, orang tidak akan memilih solusi pertama yang mereka dengar, seperti biasa. Dan kita tahu bahwa solusi pertama adalah solusi duniawi dan kurang kreatif.
7. Berikan umpan balik kepada komunitas, bahkan jika mereka tidak menyukainya: Orang yang belajar selalu perlu diberi umpan balik segera setelah ada yang perlu diperbaiki. Orang yang dikoreksi mungkin tidak suka dikoreksi, tetapi itu harus dilakukan. Hanya dilakukan secara terpisah – tidak di depan banyak orang atau dengan komentar menghakimi orang tersebut, karena yang dinilai adalah aktivitas yang dilakukan.
8. Jangan berbohong: Jika Anda berbohong kepada publik, Anda pasti akan ketahuan dan Anda tidak akan bisa bekerja dengan mereka lagi.
9. Jangan berbicara buruk tentang program lain, konsultan lain, atau supervisor proyek di depan umum: Orang akan berpikir Anda menjelek-jelekkan mereka ketika mereka berada di tempat lain, karena kebiasaan mengatakan hal-hal negatif. Orang akan menganggap ini tidak etis.
10. Menghormati pemimpin/pejabat lokal: Tokoh masyarakat adalah orang yang dihormati oleh banyak orang di desa. Jika mereka mau membantu pendamping, tugas akan lebih efektif. Di sisi lain, jika mereka tidak setuju, mereka harus diajak berdialog sampai mereka memahami sudut pandang kita. Ada dua hal yang perlu diingat: (1) jangan "pura-pura" menghormati, karena itu semacam manipulasi; (2) menghormati bukan berarti harus setuju. Teman boleh punya pendapat lain, tapi tetap menghormati.
11. Menghargai pengalaman dan kemampuan orang lain: Pasti banyak orang dalam masyarakat yang memiliki pengalaman dan kemampuan. Orang diinginkan dan digunakan, dan mereka dapat membantu teman mengubah pola pikir orang lain. Masyarakat juga harus didorong untuk mencari orang-orang yang cakap yang sudah ada di masyarakat setempat.
12. Netral, tidak memihak (kecuali yang tidak sesuai dengan tujuan program): Fasilitator memihak orang-orang yang lemah, baik perempuan, pemuda, suku terasing, maupun orang miskin. Selain itu, mereka tidak boleh memilih atau mendukung kelompok tertentu dalam diskusi atau debat. Jika

fasilitator mendukung salah satu pihak, masyarakat tidak lagi percaya bahwa fasilitator adalah orang yang netral..

Agar Pendamping Lokal Desa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka seorang Pendamping Lokal Desa dituntut untuk memiliki etika atau perilaku yang baik pula.

Dalam penelitian ini, indikator perilaku (*attitude*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dianalisis berdasarkan sub indikator perilaku yang terdiri dari:

- a. Hubungan sosial Pendamping Lokal Desa dengan tim kerja maupun masyarakat Desa;
- b. Kejujuran Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Kemauan Pendamping Lokal Desa dalam mensukseskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Rasa percaya diri dan inisiatif yang dimiliki Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner penelitian mengenai indikator perilaku (*attitude*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, akan dijelaskan pada tabel 5.9 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.9. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Perilaku (*Attitude*)

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Hubungan sosial dengan tim kerja	Frekwensi	2	14	9	0	0	25	3,72 Baik
		Skor	10	56	27	0	0	93	
2	Kejujuran dalam melaksanakan kegiatan	Frekwensi	1	21	3	0	0	25	3,92 Baik
		Skor	5	84	9	0	0	98	
3	Kemauan mensukseskan kegiatan	Frekwensi	0	17	8	0	0	25	3,68 Baik
		Skor	0	68	24	0	0	92	
4	Rasa percaya diri dan	Frekwensi	1	9	15	0	0	25	3,44

inisiatif	Skor	2	14	9	0	0	25	Baik
Rata-Rata Penilaian Indikator Perilaku (<i>Attitude</i>)								3,69 Baik

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. **Baik : 3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan tabel 5.9 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator perilaku (*attitude*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat ditanggapi oleh responden penelitian rata-rata sebesar 3,69 dengan katagori Baik. Skor tertinggi sebesar 3,92 mengenai kejujuran Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan skor terendah sebesar 3,44 mengenai Rasa percaya diri dan inisiatif yang dimiliki Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan data pada tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa perilaku (*attitude*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat menurut sebahagian besar responden penelitian berada pada kategori Baik

Tanggapan dari masing masing informan penelitian mengenai indikator perilaku (*attitude*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan Pendamping Teknik Infrastruktur Kecamatan Kampar Kiri adalah sebagai berikut:

“Penilaian saya untuk perilaku Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai terutama sekali pada sesama Pendamping Desa sangat baik. Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai menurut saya termasuk pendamping Desa yang paling

aktif dalam bersosialisasi dengan sesama rekan kerja. Kami juga membentuk grup *Whatsapp* untuk dapat saling berkomunikasi antara sesama dan terlihat keaktifan saudara pendamping ini dalam memberikan motivasi dan informasi-informasi terbaru dalam grup. Begitu juga saat kami mengadakan rapat koordinasi baik di Kecamatan ataupun di Kabupaten, Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai selalu antusias memberikan tips-tips kepada sesama rekan kerja dalam melaksanakan tugas dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan.”

Tanggapan berikutnya terkait dengan kejujuran Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai ditanggapi oleh Kepala Desa Sungai Rambai sebagai berikut:

“Menurut saya untuk sikap jujur dari pendamping lokal desa selama bertugas sudah baik. Selama ini apa saja informasi ataupun pesan yang diamanahkan, nahk dari kami ke pemerintah ataupun dari pihak pemerintah kepada masyarakat Desa, selalu disampaikan dengan baik. Sehingga kami dalam besikap dan bertindak juga dalam memberikan masukan pada pemerintah terkait dengan segala permasalahan desa yang terjadi disini berjalan dengan sangat harmonis. .”

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing informan tersebut dapat diketahui bahwa perilaku (*attitude*) dari Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah mencerminkan perilaku yang baik. Dengan adanya perilaku yang baik dari seorang Pendamping Lokal Desa tentunya sangat mendukung kinerja Pendamping Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

5.2.4. Kepemimpinan (*Leadership*).

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin organisasi, bahkan bolak-balik organisasi sering mengidentifikasi dengan perilaku kepemimpinan pemimpin. Jadi, Pemimpin harus bertanggung jawab atas terselenggaranya organisasi atau lembaga dipimpin, ini menempatkan posisi pemimpin yang sangat penting dalam suatu organisasi atau lembaga tertentu.

Dalam penelitian ini, indikator Kepemimpinan (*Leadership*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dianalisis berdasarkan sub indikator kepemimpinan yang terdiri dari:

- a. Kemampuan Pendamping Lokal Desa melakukan inovasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam menyampaikan program-program pemberdayaan masyarakat serta memahami berbagai permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa;
- c. Kemampuan Pendamping Lokal Desa memotivasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan Desa;
- d. Kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam mengawasi dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai indikator Kepemimpinan (*Leadership*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, akan dijelaskan pada tabel 5.10 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.10. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kepemimpinan (*Leadership*)

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Kemampuan dalam berinovasi	Frekwensi	0	9	11	5	0	25	3,16 Baik
		Skor	0	36	33	10	0	79	
2	Kemampuan dalam menyampaikan program	Frekwensi	1	14	10	0	0	25	3,64 Baik
		Skor	5	56	30	0	0	91	
3	Kemampuan memotivasi masyarakat	Frekwensi	0	11	12	2	0	25	3,36 Baik
		Skor	0	44	36	4	0	84	
4	kemampuan mengawasi dan menggunakan sumberdaya	Frekwensi	1	17	7	0	0	25	3,76 Baik
		Skor	5	68	21	0	0	94	
Rata-Rata Penilaian Indikator Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)								3,48 Baik	

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. **Baik** : **3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan tabel 5.10 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator kepemimpinan (*Leadership*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat ditanggapi oleh responden penelitian rata-rata sebesar 3,48 dengan katagori Baik. Skor tertinggi sebesar 3,76 mengenai kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam mengawasi dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan skor terendah sebesar 3,16 adalah mengenai kemampuan Pendamping Lokal Desa melakukan inovasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan data pada tabel 5.10 diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan (*Leadership*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat menurut sebahagian besar responden penelitian berada pada kategori Baik

Tanggapan dari masing masing informan penelitian mengenai indikator kepemimpinan (*Leadership*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan tugas dari masing-masing pendamping desa kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar selalu melakukan penilaian ataupun evaluasi atas kinerja dari masing-masing pendamping yang bertugas. Untuk wilayah Desa Sungai Rambai, Berdasarkan hasil penilaian yang telah kami lakukan dapat di ketahui bahwa Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai termasuk salah satu Pendamping Desa yang memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan inovasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa konsep inovasi yang ditawarkan kepada kita dan sedang kita analisis untuk diterapkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat..”

Tanggapan berikutnya terkait dengan kemampuan untuk menyampaikan program pemberdayaan masyarakat ditanggapi oleh Ketua BPD Desa Sungai Rambai sebagai berikut:

“Pendamping Lokal Desa sat ini menurut saya memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Walau masih tergolong muda, namun dalam menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat sudah sangat baik dan mampu menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam program-program tersebut. Cara berkomunikasi juga bagus dan mudah dipahami oleh masyarakat desa.”

Tanggapan yang sama mengenai kemampuan bprogram pemberdayaan kepada masyarakat juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Rambai sebagai berikut:

“Cukup bagus. Kami mudah mengerti apa yang disampaikan oleh Pendamping Desa. Begitu juga dalam menanggapi pendapat masyarakat. Pendamping Desa yang bertugas saat ini dengan mudah dapat memahami apa saja keluhan yang kami sampaikan. Cukup baguslah menurut saya.”

Sementara itu mengenai tanggapan tentang kemampuan Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai memotivasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ditanggapi oleh Kepala Desa Sungai Rambai sebagai berikut:

“Kunci suksesnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini memang terletak pada motor penggerak kegiatan Pemberdayaan. Dalam hal ini yang menjadi motor penggerak adalah Pendamping Lokal Desa. Selama ini menurut pengamatan saya Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah mampu memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Hampir rata-rata masyarakat khususnya yang bertempat tinggal disekitaran kantor Desa, memilih untuk ikut program pemberdayaan tersebut dan alhamdulillah ini semua berkat motivasi yang di lakukan oleh Pendamping Lokal Desa.”

Terkait dengan kemampuan Pendamping Lokal Desa dalam mengawasi dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat ditanggapi oleh Pendamping Desa Kecamatan Kampar Kiri sebagai berikut:

“ Kita akui dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini, kita masih terkendala dengan sarana prasarana dan sumberdaya yang ada. Untuk itu sangat diperlukan motor penggerak pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini yang memiliki jika kepemimpinan dan kemampuan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada untuk kesuksesan pelaksanaan program. Penilaian saya untuk Pendamping Lokal yang bertugas di Desa Sungai Rambai ini sudah cukup baik. Dimana Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, sehingga program-program kegiatan yang dilaksanakan tetap dapat terselenggara dengan baik walaupun mengalami keterbatasan sumberdaya yang memadai.”

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing informan tersebut dapat diketahui bahwa kepemimpinan (*Leadership*) dari Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah baik. Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sudah melakukan inovasi-inovasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dengan baik, disamping itu Pendamping Lokal Desa juga memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan program-program pemberdayaan masyarakat. Pendamping Lokal Desa mampu memotivasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam setiap pelaksanaan program pemberdayaan serta mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam upaya mengantisipasi keterbatasan sumberdaya yang seharusnya disiapkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sub indikator dari masing-masing indikator variabel Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, akan dijelaskan pada tabel 5.11 rekapitulasi tanggapan responden dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.11. Rekapitulasi Tanggapan Responden Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Desa di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Prestasi kerja (Achievement)	Frekwensi	9	55	36	0	0	100	3,73 Baik
		Skor	45	220	108	0	0	373	
2	Keahlian (Skill)	Frekwensi	9	41	25	0	0	75	3,79 Baik
		Skor	45	164	75	0	0	284	
3	Perilaku (Attitude)	Frekwensi	4	61	35	0	0	100	3,69 Baik
		Skor	20	244	105	0	0	369	
4	Kepemimpinan (Leadership)	Frekwensi	2	51	40	7	0	100	3,48 Baik
		Skor	10	204	120	14	0	348	
Jumlah		Frekwensi	24	208	136	7	0	375	3,67 Cukup Baik
		Skor	120	832	408	14	0	1374	
Rata-rata Penilaian Variabel Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar									

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. **Baik : 3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan tabel 5.11 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat ditanggapi oleh responden penelitian rata-rata sebesar 3,67 dengan katagori Baik. Skor tertinggi sebesar 3,79 mengenai Keahlian (Skill) Pendamping Lokal Desa dan skor terendah sebesar 3,48 adalah mengenai Kepemimpinan (Leadership) Pendamping Lokal Desa.

Berdasarkan data pada tabel 5.11 diatas dapat diketahui bahwa Kinerja Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat menurut sebahagian besar responden penelitian berada pada katagori Baik.

5.3. Pembahasan

5.3.1. Analisis Indikator Prestasi kerja (*Achievement*)

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan Prestasi kerja (*Achievement*) diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,73 berada pada katagori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Prestasi kerja (*Achievement*) Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata berada pada kategori Baik.

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian terkait dengan Prestasi kerja (*Achievement*) Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar diketahui bahwa Prestasi Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah menunjukkan prestasi yang baik. Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, selalu update dengan berbagai informasi dan data tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta ramah dengan sesama tenaga pendamping dan juga masyarakat Desa lainnya.

5.3.2. Analisis Indikator Keahlian (*skill*)

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan Keahlian (*Skill*) diperoleh nilai rata-rata sebesar

3,79 berada pada katagori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Keahlian (*Skill*) Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata berada pada kategori Baik.

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian terkait dengan keahlian (*skill*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar diketahui bahwa keahlian (*skill*) Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah baik. Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan telah memiliki inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Rambai.

5.3.3. Analisis Indikator Perilaku (*Attitude*)

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan perilaku (*attitude*) diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,69 berada pada katagori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku (*attitude*) Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata berada pada kategori Baik.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing informan tersebut dapat diketahui bahwa perilaku (*attitude*) dari Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah mencerminkan perilaku yang baik. Dengan adanya perilaku yang baik dari seorang Pendamping Lokal Desa tentunya sangat mendukung kinerja

Pendamping Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

5.3.4. Analisis Indikator Kepemimpinan (*Leadership*)

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan Kepemimpinan (*leadership*) diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,48 berada pada katagori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan (*leadership*) Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata berada pada kategori Baik.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing informan tersebut dapat diketahui bahwa kepemimpinan (*Leadership*) dari Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai sudah baik. Pendamping Lokal Desa Sungai Rambai Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sudah melakukan inovasi-inovasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dengan baik, disamping itu Pendamping Lokal Desa juga memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan program-program pemberdayaan masyarakat. Pendamping Lokal Desa mampu memotivasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam setiap pelaksanaan program pemberdayaan serta mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam upaya mengantisipasi keterbatasan sumberdaya yang seharusnya disiapkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

5.3.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil penelitian yang ditelaah dilaksanakan mengenai Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, maka dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan Masyarakat antara lain akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Minimnya sumberdaya Pendamping Lokal Desa yang saat ini bertugas. Secara kuantitas, pendamping desa untuk Kabupaten Kampar belum ideal. Konsep ideal pelayanan desa adalah satu desa, satu desa pendamping. Namun, di Kabupaten Kampar, satu pendamping desa bisa membantu 3-4 desa. Keterbatasan kemampuan fisik pendamping desa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan. Beban kerja yang tidak sebanding dengan tenaga yang ada sehingga pekerjaan pendamping desa setempat tidak bisa fokus dalam menjalankan tugas pendampingan pemberdayaan masyarakat dan tentu akan mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas pendampingan
2. Adanya penugasan-penugasan diluar tugas rutin pendamping lokal desa yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kepada pendamping lokal desa tanpa dibekali dengan kegiatan pelatihan sebelum diberikannya tugas tersebut.
3. Seringnya terjadi perubahan-perubahan nomenklatur administrasi pelaporan kegiatan karena perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan

perundangan tentang tata naskah laporan kinerja pendamping lokal desa. Dengan seringnya perubahan dan tata administrasi pelaporan kegiatan, maka secara langsung akan mempengaruhi kinerja seorang pendamping lokal desa dalam melaksanakan tugas.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berada pada kategori Baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Minimnya jumlah tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Untuk satu orang tenaga Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi 3-4 desa sekaligus. Keterbatasan kemampuan fisik pendamping desa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan serta beban kerja yang tidak sebanding dengan tenaga yang ada pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas pendampingan.
 - b. Adanya penugasan-penugasan diluar tugas rutin pendamping lokal desa yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kepada pendamping lokal desa tanpa dibekali dengan kegiatan pelatihan sebelum diberikannya tugas tersebut.

- c. Seringnya terjadi perubahan-perubahan nomenklatur administrasi pelaporan kegiatan karena perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan perundangan tentang tata naskah laporan kinerja pendamping lokal desa. Dengan seringnya perubahan dan tata administrasi pelaporan kegiatan, maka secara langsung akan mempengaruhi kinerja seorang pendamping lokal desa dalam melaksanakan tugas

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti kemudian menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia hendaknya lebih memperhatikan kebutuhan jumlah tenaga Pendamping Lokal Desa yang sesuai untuk ditugaskan diberbagai wilayah Perdesaan khususnya untuk wilayah Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Kampar. Dengan minimnya jumlah tenaga Pendamping yang saat ini bertugas, maka akan berdampak langsung pada kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Begitu juga dengan besaran gaji yang diterima oleh Pendamping Lokal Desa yang kecil dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 2.561.00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), besaran gaji ini sudah termasuk Honorarium, Bantuan Biaya Operasional dan Asuransi. Dengan besaran gaji seperti itu, termasuk dengan keseluruhan biaya

yang harus dikeluarkan oleh seorang Pendamping Lokal Desa dalam bertugas di desa jika di bandingkan dengan kondisi saat ini adalah tergolong kecil. Maka dari itu sangat diharapkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia agar lebih memperhatikan dan meningkatkan besaran gaji yang diberikan kepada tenaga Pendamping Lokal Desa agar dapat Pendamping Lokal Desa dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama saat melakukan kunjungan-kunjungan kedesa-desa sekitar yang kondisi geografisnya sangat sulit dan juga infrastruktur desa yang sangat minim mengakibatkan biaya yang mesti di keluarkan oleh seorang Pendamping Lokal Desa menjadi jauh lebih besar. Begitu juga dengan jumlah pendamping Lokal Desa yang tidak sesuai dengan jumlah Desa yang ada seperti yang tetuang dalam Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa pasal 17 sd 1 menyatakan bahwa: Pendamping Lokal Desa (PLD) berkedudukan ditingkat Desa ini artinya satu orang Pendamping Lokal Desa mendampingi 1 Desa. Kondisi tentunya tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di Desa Sungai Rampai dan desa-desa lainnya di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dimana untuk satu orang tenaga Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi 3-4 desa sekaligus. Keterbatasan kemampuan fisik pendamping desa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan serta beban kerja yang tidak sebanding dengan tenaga yang ada pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas pendampingan

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebelum memberikan penugasan-penugasan yang bersifat insidental kepada masing-masing Pendamping Lokal Desa hendaknya terlebih dahulu memberikan pembekalan berupa pelatihan kepada masing-masing petugas, agar Pendamping Lokal Desa dapat bertugas dengan baik.
3. Kepada Pendamping Lokal Desa Khususnya di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar agar senantiasa membekali diri dengan berbagai pengetahuan dan keahlian dan selalu update informasi agar senantiasa mampu mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi terkait dengan nomenklatur administrasi pelaporan kegiatan.
4. Kepada Masyarakat Desa Sungai Rambai agar selalau berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, agar program-program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan Pemerintah tersebut dapat dirasakan manfaatnya dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah, 2008. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat, Humaniora, Bandung
- Affifuddin, 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Alfabeta. Bandung.
- Azwar, Azrul 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan, Bina Rupa Aksara. Tangerang
- Azwar Saifudin. 2010. Sikap Manusia. Pustaka pelajar. Yogyakarta
- Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Edi Suharto, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial. Ptrevika Aditam. Bandung
- Efriza, 2013. Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan, Alfabeta, Bandung,
- Gitosaputro, Sumaryo and Rangga, K. K. (2015) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya Di Era Otonomi Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Griffiths, A. 2004. Work organization and stress, WHO. Switzerland
- Hanif Nurcholis, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara: PT. Bumi Aksara Jakarta
- Jayadinata, 2006. Pembangunan Desa Dalam Perencanaan. ITB. Bandung.
- Kartono, Kartini, 2006, Pemimpin dan Kepemimpinan, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta :

- Kartasmita, Ginanjar. 1995. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta
- Kartono, Kartini. 2003. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Jakarta: PT raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Dan Praktik). Rajawali Press. Jakarta
- Keban, T. Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gavamedia. Yograkarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2013, Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Moleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Nor,Ghofur.2014,Manajemen Publik Pada Pemerintahan. CetakPertama: BumiAngkasa. Jakarta
- Pasalong, Harbani, 2011. Teori Administrasi Publik, Alfabeta. Bandung
- Pambudi, Himawan S. 2003. Politik Pemberdayaan, Jalan Baru Keadilan Dokumen Pertama Konsolidasi Pembaruan Desa, Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia. BPFE: Yogyakarta.
- Prijono, Onny S dan A.M.W. Pranarka. 1996. Pemberdayaan (Empowerment). Centre for Strategic and International Studies. Jakarta
- Rahayu, Budiana. Pembangunan Perekonomian Nasional melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, MG, Semarang; 2008
- Rivai, 2003 Kepemimpinan Pendidikan, Cahaya Ilmu Jakarta:
- Rivai, Veithzal, Ahmad Fawzi Mohd. Basri. 2005. Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Rajawali Pers: Jakarta.
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, 2006. Pemberdayaan Masyarakat, Alqaprit Jatinegoro, Sumedang:

- Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Refika Aditama. Bandung
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi; Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Ed 1, Mandar Maju, Bandung
- Siagian, Sondang P, 2009. Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara. Jakarta
- Silalahi, Ulbert, 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. FE UI. Jakarta
- Sinambela, Poltak. Lijan. 2012. Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Soejono Soekanto, 1986. Patologi Sosial, Rineka Cipta, Jakarta
- Soemantri, Bambang Trisantoso. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokusmedia, Bandung; 2011
- Subana, M dan Sudrajat, 2005, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Pustaka Setia. Bandung
- Sufian Hamim. 2005. Manajemen Strategis Pembangunan Daerah dan Perdesaan, UIR PRESS. Pekanbaru
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung:
- _____. 2016. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Ganesha. Bandung
- Suharto, Edi, 2006. Analisa Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Aditama, Bandung
- Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kedelapan. Prenadamedia. Jakarta
- Syafhendri, 2014. Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Pekanbaru
- Thoha. Miftah. 2010. Perilaku Organisasi. Penerbit : Rineka Jakarta.

_____. Kepemimpinan dalam Menejemen. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Timple, A.Dale. 2000. Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kepemimpinan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Tommy Suprpto, 2009. Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, MedPressCet. 8. , Yogyakarta

Wahjosumidjo. 2005. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widjaja, HAW. 2002. Pemerintah desa. PT Amitaraja Grafindo Persada. Jakarta

Yamin, Martinis dan Maisah. 2010. Standarisasi Kinerja Guru. Jakarta: Gaung Persada

Undang-Undang/Peraturan/ Jurnal/Site

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat

Deni Triyanto. 2018. Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah) 2018. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Desember 2018ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2

Lutfi Hilman, dkk. 2019. Efektifitas Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep 2019). Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. ISSN 2302-8432. Volume 13, No. 3, Tahun 2019, Hal 90-95

- Irfan, dkk. 2020. Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima) Jurnal Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP Bima. ISSN Online 2599-2511
- Izzan Afa Mahsa Arifin. 2021. Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember. <http://repository.unmuhjember.ac.id/9289/>
- Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Mohammad Fauzi Alvi Yasin, dkk. 2019. Kinerja Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang.. Jurnal Citizen Charter Vol 1 No 1 July 2019. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/50999>
- Ramanthia. 2021. Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Ramanthia. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/386/1913>
- Rezky Susanti 2015. Efektifitas Pendamping Desa dan Partisipasi Kabupaten Bengkalis Jom FISIP Volume 2 No 1-Februari 2015 Jurnal Program Studi Sosiologi- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Sutrisno, D. 2005. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang